

**KEBIJAKAN HUNGARIA DALAM MENOLAK *COMMON EUROPEAN*
ASYLUM SYSTEM (CEAS) UNTUK MENANGANI PENGUNGI PADA
TAHUN 2015 – 2020**

SKRIPSI



Oleh:

KEVIN QODRIN FIRTIYANTO

17323050

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

**KEBIJAKAN HUNGARIA DALAM MENOLAK *COMMON EUROPEAN*
ASYLUM SYSTEM (CEAS) UNTUK MENANGANI PENGUNGI PADA
TAHUN 2015 – 2020**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

KEVIN QODRIN FIRTIYANTO

17323050

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN HUNGARIA DALAM MENOLAK *COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM* (CEAS) UNTUK MENANGANI PENGUNGSI PADA TAHUN 2015 – 2020

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal 16 Agustus 2022

Mengesahkan

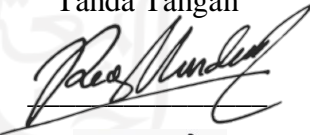

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A.)

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Wahyu Arif Raharjo, S.IP., M.I.R
- 3 Gusti Eni Putri, S.IP., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

26 Agustus 2022,



Kevin Qodrin Firtiyanto

DAFTAR ISI

SKRIPSI	1
HALAMAN PENGESAHAN	3
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	4
DAFTAR ISI	5
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan Penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	5
1.6 Kerangka Pemikiran	8
1.7 Metode Penelitian	9
1.7.1 <i>Jenis Penelitian</i>	9
1.7.2 <i>Subjek dan Objek Penelitian</i>	9
1.7.3 <i>Metode Pengumpulan Data</i>	9
1.7.4 <i>Proses Penelitian</i>	10
1.8 Sistematika Pembahasan	10
BAB II	12
<i>COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM, PENGUNGSI DI EROPA DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK DOMESTIK HUNGARIA</i>	12
2.1 Politik Domestik Hungaria	12
2.1.1 Faktor Identitas dan Budaya Hungaria	15
2.1.2 <i>Desicion Maker</i> dalam Kebijakan Hungaria	17
2.1.3 <i>Influencer</i> dalam Politik Hungaria	18
2.2 Kapasitas Ekonomi dan Militer Hungaria	27
2.2.1 Kapasitas Ekonomi	27
2.2.2 Kapasitas Militer	30
BAB III	35
3.1 Faktor Geografis	35
3.2 Faktor Ekonomi Internasional	37

3.3.1 Kondisi Politik Negara Asal Pengungsi	42
3.3.2 Konteks Politik Uni Eropa	46
BAB IV	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2 Rekomendasi	54
DAFTAR PUSTAKA	55



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Framing Media Pro-Pemerintah di Hungaria	22
Tabel 2.4 Anggaran Hungaria Untuk Bidang Pertahanan	31
Tabel 2.5 Jumlah Personel Tentara Hungaria	31



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Permohonan Suaka di Hungaria tahun 2015

42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Informasi Pemerintah Hungaria	24
Gambar 2.2 Konsultasi Nasional (Rencana Soros)	25
Gambar 2.3 Kampanye Soros dan Juncker	26
Gambar 3.1 Peta geografis Hungaria	36
Gambar 3.2 Persepsi Politik atas Tantangan UE	39
Gambar 3.3 Tantangan utama yang dihadapi UE	40



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik yang terjadi di Timur Tengah pada tahun 2011 akibat adanya krisis ekonomi dan ketidakadilan yang dialami masyarakat mengakibatkan masyarakat Timur Tengah berupaya untuk menjatuhkan rezim yang berkuasa. Masyarakat Timur Tengah melakukan pembelaan terhadap dirinya bahwa pemerintahan pada saat itu tidak dapat dipercaya. Mereka berupaya mengembalikan negaranya dengan menjatuhkan kekuasaan rezim yang berkuasa pada saat itu. Masyarakat Timur Tengah melawan ketidakbenaran yang terjadi di negaranya demi hidup yang lebih baik. Masyarakat Timur Tengah menyebutnya dengan *Arab Spring* atau yang disebut dengan Revolusi Arab (Ghafur 2014).

Memburuknya keadaan di Timur Tengah mengakibatkan para warga yang tinggal di daerah konflik memilih untuk meninggalkan tempat tinggal mereka dan mencari suaka di negara-negara Eropa karena Eropa diyakini sebagai benua terdekat. Keterbukaan Uni Eropa untuk para pengungsi dan banyaknya negara maju meyakinkan masyarakat Timur Tengah untuk tinggal di Eropa demi kehidupan yang lebih baik. Rute yang dilalui oleh para pengungsi tersebut salah satunya adalah dengan melewati Laut Mediterania, namun lebih dari 600 orang tenggelam akibat perahu yang mereka tumpangi terbalik di Perairan Libya pada bulan April 2015. Berbagai cara dilakukan oleh para pengungsi untuk menuju kehidupan yang damai, sejahtera, dan makmur di Eropa, namun hal itu tidak mudah untuk dilakukan karena

banyak pengungsi yang tidak memiliki dokumen-dokumen internasional untuk pergi ke Eropa, di mana hal tersebut dapat membahayakan diri mereka sendiri.

Pada tahun 2015 seluruh dataran Eropa sedang dilanda sebuah musibah di mana para pengungsi dari Suriah bermigrasi ke Eropa karena Suriah sedang mengalami konflik yang cukup hebat. Tidak hanya masyarakat Suriah, masyarakat Afghanistan dan Iraq yang memiliki konflik di negaranya juga bermigrasi ke Eropa hingga mencapai lebih dari 900,000 jiwa pada saat itu (Spindler 2015). Sayangnya tidak semua negara anggota Uni Eropa dengan mudah mengizinkan pengungsi untuk memasuki negaranya atau hanya meminta izin untuk melewati negaranya sebagai negara transit. Hal ini dilakukan dengan menghalau para pengungsi yang ingin mencari suaka dan yang hanya hendak transit untuk meneruskan perjalanannya ke negara lain.

Terdapat beberapa negara di bagian perbatasan dan dekat dengan laut seperti Yunani, Italia, Bulgaria, Kroasia, Romania, dan Hungaria, namun hanya Hungaria, Yunani, dan Italia yang menghalau pengungsi meskipun ketiga negara tersebut ialah negara dengan mayoritas pengungsi yang telah tiba terbanyak dari negara-negara lainnya di Eropa (BBC 2016). Hungaria ialah negara yang terletak di bagian awal perbatasan yang wajib dilalui untuk menuju ke negara-negara maju di Eropa seperti Jerman, Belgia dan Inggris, namun Hungaria sendiri tidak menerima para pencari suaka atau bahkan sekadar mengizinkan mereka untuk melewati negaranya.

Hal tersebut disebabkan adanya kemungkinan para pencari suaka untuk mendesak pemerintah Hungaria untuk mengizinkan mereka mencari suaka di Hungaria. Hungaria menentang kebijakan *EU* dalam menerima pencari suaka,

bahkan tidak sedikit yang membicarakan bahwa Hungaria telah mengusir hingga melanggar HAM para pencari suaka. Hal itu menuntun Pengadilan Eropa untuk memutuskan bahwa Hungaria telah melanggar kewajiban mereka sebagai anggota *EU* karena menolak untuk menerima bagian adil dari para pencari suaka. *EU* telah membagi sekitar 160.000 pencari suaka ke tiga negara anggota *EU* yakni Yunani, Italia, dan Hungaria, namun Hungaria menolak kebijakan tersebut (Pronczuk 2020).

Berlandaskan Konvensi Dublin 1990 yang membahas penetapan kriteria pada suatu negara yang bertanggung jawab untuk memeriksa permohonan suaka, dan juga ditetapkannya suaka menjadi salah satu permasalahan di *EU* pada tanggal 1 November 1993, mengawali dibentuknya *CEAS* pada bulan Mei 1999 yang dituangkan ke dalam Perjanjian Amsterdam (EASO 2016). Tugas *CEAS* ialah untuk memastikan para pencari suaka diperlakukan adil dan menghindari adanya penyalahgunaan HAM.

Selain Konvensi Dublin, *CEAS* juga terbentuk berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 tentang pengungsi dan juga berdasarkan dari prinsip *EU* itu sendiri bahwa Uni Eropa merupakan wilayah untuk melindungi bagi para pengungsi yang telah menyelamatkan diri dari konflik dan penganiayaan di negara asalnya. Para anggota *EU* memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyambut para pencari suaka dengan adil dan bermartabat serta tidak melakukan tindak pelanggaran HAM. Para pencari suaka yang ingin mencari suaka di Eropa harus mengikuti kebijakan yang telah dibuat oleh *CEAS* itu sendiri agar mereka tercatat dan terlindungi oleh Hukum Internasional (EU, 2021).

Hungaria menolak kebijakan *EU* yang ingin mendatangkan para pencari suaka ke Eropa karena Hungaria melihat adanya potensi bahwa Eropa akan goyah

akibat serangan teroris mendatang, meskipun terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh *EU*. *EU* juga mewajibkan setiap negara anggotanya untuk membantu para pencari suaka, di mana negara-negara tersebut akan mendapatkan kuota redistribusi, namun hal itu tetap membuat Hungaria menolak kebijakan tersebut (C. M. Attila Juhász, *Refugees, Asylum and Migration Issues in Hungary* 2017). Penolakan Pemerintah Hungaria terhadap kebijakan *EU* terkait pencari suaka dianggap sebagai langkah yang baik bagi negaranya. Selain untuk melindungi negara, kebijakan domestik Hungaria juga bertentangan dengan kebijakan migrasi *EU* dengan keterbukaannya terhadap para pencari suaka.

Di tahun 2020, Eropa masih kedatangan pencari suaka yang mencari suaka sebagai tempat tinggal yang cukup aman bagi mereka dikarenakan tempat tinggal mereka yang terdahulu telah hancur akibat perang ataupun kerusuhan yang terjadi di negaranya. Hampir 50.000 pencari suaka datang ke Eropa dan 25% di antaranya adalah anak-anak (UNICEF 2021).

Oleh karena itu penting sekali adanya *CEAS* di wilayah Eropa karena para pencari suaka yang didominasi korban perang dan penganiayaan, akan menuju ke Eropa untuk mencari suaka. *CEAS* ikut andil untuk membantu meringankan negara-negara anggota *EU* serta para pencari suaka. Namun setelah ditelaah, Hungaria menolak adanya penambahan maupun datangnya para pencari suaka yang ditakutkan akan mengancam keselamatan negaranya bahkan keselamatan Eropa itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengapa Hungaria menolak kebijakan *Common European Asylum System*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hungaria menolak kebijakan *CEAS*, di mana para anggotanya diwajibkan untuk membantu *EU* dalam penanggulangan krisis pengungsi.

1.4 Cakupan Penelitian

Batasan penelitian ini akan dimulai pada tahun 2015, di mana pada tahun 2015 Hungaria menolak kebijakan *CEAS* untuk melindungi negaranya dari ancaman-ancaman yang akan datang di negaranya maupun di Eropa. Pada tahun 2015 krisis pengungsi melanda dataran eropa dan Hungaria menolak kebijakan *CEAS* yang ingin membantu para pencari suaka. Penelitian ini akan diakhiri di tahun 2020 dimana pandemi *Covid-19* melanda ke seluruh penjuru dunia dari akhir tahun 2019, sedangkan krisis pengungsi di Eropa masih berlangsung dan seharusnya mulai berkurang, namun para pengungsi masih tetap berada di Hungaria ataupun Eropa. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan Hungaria yang menolak kebijakan *CEAS* dalam situasi yang sedang genting di Eropa dari tahun 2015 hingga tahun 2020.

1.5 Tinjauan Pustaka

Menurut Diana Ivanova dalam jurnalnya yang berjudul “*Hungarian Security Policy and The Migrant Crisis (2015-2017)*” (2017) *EU* tidak memikirkan keamanan negara-negara yang berada di perbatasan Balkan Barat, di mana negara-negara tersebut sangatlah rentan terkena ancaman dari imigran gelap sehingga harus disepakati bersama untuk menanggulangnya. Penanggulangan dilakukan tanpa adanya pelanggaran HAM (Ivanova 2017) di mana *EU* telah membuat perencanaan yang baik untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut sehingga tidak perlu dikhawatirkan lagi akan adanya terorisme, *human trafficking* dan pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang terjadi akibat para imigran. *EU* juga meminta kepada seluruh anggotanya untuk bekerjasama dalam menanggulangi dan merelokasi imigran dengan cara yang manusiawi.

Menurut Onvara Vadhanavisala dalam jurnalnya yang bertajuk “*Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary*” (2019), pemerintah Hungaria yang berada di partai sayap kanan melakukan proteksi yang kuat untuk negaranya dari para imigran dikarenakan beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, sejarah, keamanan, dan populasi di mana Orban akan menyelamatkan nilai-nilai Hungaria dan menyelamatkan Kristen dari para imigran yang menurutnya nilai-nilai Hungaria akan hilang (Vadhanavisala 2019). Ketakutan terhadap imigran dan para pendatang dari luar atau yang biasa disebut *Xenophobia* membuat Orban serta partai sayap kanan mempertahankan negaranya dan membujuk masyarakatnya untuk menolak kedatangan para imigran yang ingin tinggal di Hungaria.

Dewan Eropa dalam laporannya yang bertajuk “*Communication From The Commission To The European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and The Committee of The Region; A European Agenda*

Migration” (2015) mengungkapkan bahwa *EU* dan *UNHCR* telah bekerjasama dalam menangani permasalahan krisis migrasi pada tahun 2015 dan mewajibkan para anggota *EU* untuk berpartisipasi dengan cara bertanggung jawab dalam penerimaan, pemeriksaan yang disesuaikan dengan pendapatan negara tersebut, jumlah populasi, tingkat pengangguran serta jumlah pencari suaka dan pengungsi yang telah tinggal dengan dokumen-dokumen yang lengkap (*EU, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN AGENDA ON MIGRATION*, 2015). *UNCHR* juga membantu *EU* dengan menggelontorkan dana sebesar 50 juta Euro dan Dewan komisi meminta kepada seluruh anggota *EU* untuk serius dalam menangani krisis migrasi ini.

Seperti yang diketahui bahwa pencari suaka adalah orang-orang yang mencari perlindungan atas hidupnya dikarenakan tempat tinggal yang semula mereka tinggali mengalami sebuah musibah seperti adanya peperangan atau konflik lainnya sehingga tempat tinggal mereka hancur. Kebijakan Hungaria terhadap para pencari suaka yakni dengan menahan para pencari suaka yang tidak memiliki visa maupun dokumen yang sah sehingga mereka dianggap sebagai imigran gelap. Mereka akan ditahan selama 12 bulan bersama imigran gelap lainnya di pusat-pusat penahanan yang awalnya digunakan untuk menahan para penjahat yang keluar masuk Hungaria tanpa memiliki dokumen-dokumen yang sah (B. H. Attila Juhász 2015).

Di tahun 2020 sedang terjadi pandemi yang luar biasa hebatnya. Adanya virus *Covid-19* di akhir tahun 2019 membuat semua negara di dunia berlomba-lomba untuk melindungi negaranya dari virus yang mematikan tersebut.

Perlindungan dimaksud dilakukan dengan membuat suatu kebijakan terkait para pendatang atau imigran yang hendak masuk ke negaranya, bahkan ada beberapa negara yang melarang para imigran untuk masuk ke negaranya untuk mencegah peningkatan penyebaran *Covid-19*. Salah satu negara di Eropa seperti Hungaria menginformasikan kepada imigran yang masih berada di negaranya akan diizinkan untuk tetap tinggal atau secara otomatis izin tinggalnya diperpanjang hingga 30 hari sampai keadaan membaik. Hungaria juga melarang imigran datang ke negaranya melewati jalur darat maupun udara kecuali terdapat kepentingan khusus sehingga mengharuskan imigran tersebut datang ke Hungaria (Network 2021).

Perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah diuraikan di atas dengan penelitian yang hendak dilakukan penulis adalah bahwa penulis lebih memfokuskan terkait faktor-faktor penolakan Hungaria terhadap kebijakan *CEAS* tentang pengungsi. Penulis juga mengaitkan permasalahan tersebut dengan adanya pandemi *Covid-19* sejak akhir tahun 2019 yang memberikan banyak dampak dalam berbagai bidang di negara-negara di dunia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori *Decision Making Theory* atau Teori Pengambilan Keputusan dari William D. Coplin, karena dalam membuat atau mengambil keputusan aktor harus tau sebab dan akibat ketika aktor membuat dan mengambil keputusan. Menurut William D. Coplin, jalan politik dunia dapat dipengaruhi dari kebijakan politik di negara tersebut sehingga bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri yang telah dibuat (W. D. Coplin 1971). Taruhan yang tinggi dan sangat beresiko

membuat tindakan sebuah negara dan para pemimpinnya untuk lebih hati hati dalam pengambilan keputusan. Coplin menjelaskan terdapat tiga kategori pertimbangan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri negara-negara dalam pengambilan keputusan (W. D. Coplin 1971):

1. Kondisi Politik Dalam Negeri atau Domestik
2. Kondisi Ekonomi dan Militer
3. Konteks Internasional
4. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan

Dari teori yang sudah dijelaskan diatas, penulis akan mengimplementasikannya teori tersebut dengan kebijakan Hungaria dalam penolakan kebijakan yang dilakukan CEAS ketika krisis pengungsi di Eropa pada tahun 2015 – 2020.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Peneliti akan menggunakan metode kualitatif di mana metode kualitatif sangat efisien untuk dipahami karena metode kualitatif mengolah data yang telah terkumpul untuk dapat lebih dipahami menggunakan kata-kata bukan menggunakan angka.

1.7.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah kebijakan pengungsi pemerintah Hungaria terhadap CEAS atau EU, sedangkan kebijakan CEAS atau EU merupakan objek dari penelitian ini.

1.7.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder sendiri dapat diperoleh dari situs dan laporan pemerintah, buku, jurnal ilmiah, serta media massa. Dengan proses ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi-informasi dari data sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.7.4 *Proses Penelitian*

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang dirasa cukup membantu penelitian ini. Tahap penelitian akan diuraikan sebagai berikut: Pertama, peneliti menggunakan studi kepustakaan untuk mencari referensi-referensi terkait penelitian ini. Kedua, pengumpulan data yang berasal dari jurnal, buku, artikel, berita, laman resmi, dan laporan-laporan dari pemerintah maupun dari pihak kedua yang dirasa valid untuk digunakan sebagai bahan pendukung. Ketiga, data-data yang telah terkumpul melalui sumber-sumber yang valid akan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah, kemudian peneliti akan menyimpulkan bagaimana hasil dari penelitian ini serta memberi saran terkait kasus yang diteliti.

1.8 Sistematika Pembahasan

Penulis akan menyusun penelitian dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I, di mana terdapat latar belakang masalah terkait kebijakan Hungaria dalam penolakan kebijakan *CEAS* untuk pencari suaka, yang kemudian dilanjutkan

dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Dalam Bab II, penulis akan menjelaskan bagaimana terbentuknya *Common European Asylum system (CEAS)*, menjelaskan kondisi para pengungsi di Eropa pada tahun 2015 hingga 2020 serta menjelaskan dinamika politik dalam negeri Hungaria

Pada Bab III, penulis menyebutkan faktor – faktor Hungaria menolak kebijakan CEAS di tahun 2015 – 2020 ketika krisis pengungsi di Eropa sedang berlangsung dan penulis akan mengembangkan faktor – faktor tersebut dengan teori yang sudah ada

Pada Bab IV, penulis akan menguraikan kesimpulan, rekomendasi ataupun saran terkait penelitian ini yaitu tentang kebijakan *EU* dan Hungaria terhadap pencari suaka.

BAB II

COMMON EUROPEAN ASYLUM SYSTEM, PENGUNGSI DI EROPA DAN KAITANNYA DENGAN POLITIK DOMESTIK HUNGARIA

Pada bab ini penulis akan membahas apa dan bagaimana *CEAS* terbentuk. Selain itu penulis juga akan menjelaskan kondisi pengungsi atau pencari suaka yang sedang menuju maupun yang sudah tiba di Eropa, dan yang terakhir penulis juga akan menjelaskan langkah politik domestik Hungaria dalam menyikapi kebijakan *CEAS* itu sendiri.

2.1 Politik Domestik Hungaria

Hungaria adalah salah satu negara yang terletak di bagian Eropa tengah dan berbatasan dengan Romania, Slowakia, Serbia, Kroasia, Ukraina, dan Austria. Hungaria merdeka pada tahun 1990. Hungaria mempunyai ibu kota yang bernama Budapest. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Hungaria dalam sehari-hari adalah bahasa Hungaria. Hungaria mempunyai sistem politik Republik Parlementer, di mana kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Kepala negara Hungaria dipimpin oleh seorang Presiden, di mana Presiden di Hungaria bertanggung jawab atas semua pemerintahan dan negaranya (European Union, Hungary 2020). Hungaria merupakan salah satu anggota dari 27 negara di Eropa yang tergabung dalam EU. Hungaria merupakan anggota ke 19 EU dan masuk menjadi anggota EU pada tahun 2004.

Sehubungan dengan krisis pengungsi yang terjadi, Hungaria yang sangat terlibat dalam krisis tersebut menjadi negara terdepan tanpa imigran. Jika dilihat melalui indikator migrasi lainnya, Hungaria sama seperti negara Eropa Timur

lainnya yang tidak banyak terpengaruh oleh jumlah kedatangan pengungsi. Pada tahun 2015, Eropa dibanjiri para pencari suaka. Permintaan suaka terbanyak di seluruh dataran Eropa terjadi di Hungaria, meskipun pemerintah Hungaria menolak permintaan suaka sebanyak 72% dari 1700 permintaan suaka yang diterima oleh Hungaria (Connor 2016).

Menurut data dari Komite Helsinki Hungaria, pada akhir tahun jumlah pencari suaka maupun pengungsi di negaranya telah turun menjadi 900-1.000 jiwa. Sekitar 450-500 di antaranya menjalani penahanan, sedangkan sisanya sudah menjalani prosedur imigrasi sebagai akibat dari pembatasan lebih lanjut terhadap undang-undang tentang pengungsi yang diterapkan pada tahun 2016-2017. Warga Hungaria menganggap imigrasi dan terorisme menjadi masalah terpenting yang harus mereka hadapi.

Menurut studi domestik dan internasional, prasangka buruk terhadap kelompok minoritas merupakan karakteristik penduduk Hungaria, yang dijelaskan bahwa Hungaria merupakan negara yang sangat tidak toleran seperti negara Eropa tengah dan timur lainnya. Hal ini terkait erat terhadap rasa takut atas ancaman eksistensial. Oleh karena itu, kampanye anti imigran yang dilakukan pemerintah Hungaria memiliki dukungan yang luas. Survei yang dilakukan Tarki, sebuah lembaga sosial, pada tahun 2016 menyebutkan sekitar 43% responden sama sekali tidak akan mengizinkan pengungsi untuk memasuki Hungaria. Pada Januari 2017, presentasi naik ke angka 60%, bahkan mayoritas penduduk Hungaria secara terbuka menolak semua pencari suaka (Juhász & Molnár, n.d.).

Pada 21 Agustus 2017, hanya 471 pencari suaka yang ditampung di institusi kantor imigrasi dan suaka. Mereka ditempatkan di dua zona transit di mana para

pengungsi dapat mengajukan permohonan suaka, namun dalam beberapa tahun terakhir kualifikasi untuk dapat tinggal di Hungaria semakin ketat. Pasangan dan keluarga dipisahkan, dan hanya bayi yang diizinkan untuk tinggal bersama ibu mereka (How Hungary Is Violating EU Law on Refugees | Europe | News and Current Affairs from around the Continent | DW | 08.02.2021, n.d.).

Politik Hungaria menerapkan sistem politik sayap kanan dimana pemerintah Hungaria mengadopsi konsep populisme. Konsep populisme sendiri merupakan pendekatan politik terhadap rakyat dalam mendukung hak dan kekuasaan rakyat untuk memperjuangkan perlawanannya terhadap kaum elite karena kaum elit mempunyai hak istimewa (Vadhanavisala 2019). Dari partai Fidesz yang dipimpin oleh Victor Orban mempunyai sebuah program untuk menghentikan para imigran yang terus berdatangan ke Hungaria, menurut Orban partai Fidesz tidak akan mengikuti arah kebijakan para elite Eropa. Partai Jobbik merupakan partai sayap kanan seperti partai Fidesz dimana mendukung keamanan dan kemanusiaan dari imigrasi yang tidak teratur. Menurut partai Jobbik Keamanan Hungaria atas imigran yang berdatangan akan membuat suatu masalah besar dalam Hungaria (European Commission, European Website on Integration 2019). Namun, partai Koalisi Demokratis menentang pernyataan Victor Orban yang mana menurut partai Koalisi Demokratis Victor Orban hanya memprovokasi tentang politik identitas untuk mempertahankan kekuasaan dan membuat masyarakat Hungaria seakan-akan kehilangan identitas negaranya (KOALÍCIÓ 2019).

Dengan adanya perdebatan antara partai politik di Hungaria, perdana menteri Hungaria yang berasal dari partai sayap kanan Fidesz tetap menjalankan kebijakannya untuk menghilangkan para imigran dari Hungaria. Propaganda yang

dilakukan partai Fidesz untuk menghilangkan para pengungsi untuk memenangkan kursi pemilihan di Eropa dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk membenci para pengungsi maupun migran muslim yang datang ke Hungaria (Peter Kreko 2019). Pemerintah Hungaria membuat undang-undang untuk pengungsi yang salah satunya “jika memanjat, melanggar, bahkan merusak pagar pembatas merupakan sebuah tindak kejahatan” (Stickland 2016).

2.1.1 Faktor Identitas dan Budaya Hungaria

Identitas dan Budaya merupakan sesuatu hal yang telah diterapkan di Hungaria selama ribuan tahun, menurut coplin identitas dan budaya merupakan salah satu unsur terpenting dalam mengambil sebuah kebijakan luar negeri (W. D. Coplin 2003). Sementara, identitas yang diterapkan oleh masyarakat Hungaria merupakan peninggalan dari leluhurnya ketika dalam masa kerajaan pada tahun 1001 dimana kerajaan Hungaria merupakan kerajaan Kristen.

Pada tahun 1541 hingga 1699 kerajaan Hungaria diserang oleh Kerajaan Ottoman atau Kerajaan Turki, tak hanya itu pada tahun 2015 krisis pengungsi yang terjadi di Eropa merupakan krisis yang menakutkan setelah perlawanan kepada Kerajaan Ottoman yang mana ratusan ribu muslim ingin mencari suaka bahkan ada yang ingin menetap di Hungaria. Ketakutan terhadap muslim atau Islamophobia sudah melekat bagi masyarakat Hungaria sejak zaman kerajaan Hungaria yang mana masyarakat Hungaria tidak ingin menghilangkan identitasnya sebagai negara Kristen.

Pada tahun 2017, Professor Matthew Goodwin, Thomas Raines dan Professor David Cutts melakukan riset apa yang orang eropa pikirkan tentang

imigrasi muslim? dan hasil menunjukkan bahwa 64 persen masyarakat Hungaria tidak setuju atau menolak adanya imigran muslim di negaranya dikarenakan ketakutan akan ancaman terorisme di negaranya serta hilangnya identitas Hungaria sebagai negara yang menganut Kristen (Matthew Goodwin 2017).

Hungaria selain memiliki identitas sebagai negara Kristen juga memiliki budaya budaya Kristen yang dianut sejak zaman kerajaan Hungaria. Ketakutan masyarakat Hungaria akan direbutnya budaya akibat kedatangan para pengungsi pada masa krisis pengungsi, banyak masyarakat Hungaria yang menolak untuk menerima para pengungsi di negaranya. Selain ketakutan akan ancaman terorisme dan hilangnya identitas negara, dimana riset yang dilakukan oleh Prof. Matthew Goodwin melihat 72 persen masyarakat Hungaria memiliki pandangan yang tidak baik kepada masyarakat Muslim (Matthew Goodwin 2017).

Dalam penelitiannya Joseph bebel dan Jon Collier mengenai *Euroscepticism's many faces: The cases of Hungaria and the UK*, yang menjelaskan secara definisi bahwa eurosceptism yakni pandangan akan anti Uni Eropa dalam melemahkan kedaulatan negara. Dalam konteks Hungaria, mereka beranggapan bahwa semakin lama Uni Eropa maka semakin kuat mengatur negara-negara anggotanya, sehingga ini terlihat sebagai bentuk perang dengan Hongaria (Joseph bebel 2015). Artinya, argumen tersebut dapat mempertegas bahwa secara identitas dan budaya, Hungaria sangat kedaulatan negaranya tersebut berdasarkan dua faktor itu.

2.1.2 *Decision Maker* dalam Kebijakan Hungaria

Dalam rangka melegitimasi penolakan terhadap pengungsi dan migran, *decision maker* dalam kebijakan Hungaria adalah Victor Orban selaku orang dengan populisme sayap kanan sebagai ideologi politiknya. Victor Orban merupakan Perdana Menteri Hungaria sekaligus ketua umum dari partai Fidezs. Selaku orang dengan keyakinan Kristen konservatif menjadi landasan yang tepat mengarahkan partai politiknya dengan ideologi populisme sayap kanan.

Victor Orban menegaskan dengan jelas bahwa imigran massal dari Timur Tengah dan Afrika merupakan ancaman eksistensial bagi cara hidup Eropa. Dengan hal tersebut, dirinya membangun pagar sepanjang perbatasan Hungaria dan Serbia untuk menghalau masuknya pengungsi dan migran. Kebijakan pembangunan tersebut dilakukan pada tahun 2017, dengan membangun pagar yang dialiri aliran listrik, dilengkapi sensor panas, kamera, dan pengeras suara serta dijaga ketat oleh polisi di Hungaria bagian selatan (Putri 2017).

Kebijakan tersebut dibuat atas dasar RUU baru yang bernama “*Stop Soros Law*”, Parlemen Hungaria telah mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi setiap individu atau kelompok yang menawarkan bantuan kepada imigran legal dalam mengklaim suaka. Menteri Dalam Negeri Hungaria yakni Sandor Pinter mengatakan bahwa, kami ingin menggunakan RUU itu untuk menghentikan Hongari menjadi negara imigran” (theguardian 2018).

Artinya, fakta tersebut dengan jelas tertuang di dalam jejak kebijakan yang dilakukan oleh Victor Orban selama menjabat. Konsentrasi Victor Orban terhadap *Stop Soros Law* sangat mempertegas kedudukannya sebagai *decision maker* terhadap kebijakan ini. Dengan demikian, RUU ini dirumuskan oleh Victor Orban

bersama birokrat pemerintah yang terkait, dan mempertegas ulang *decision maker* kebijakan Hungaria dalam menolak imigran.

2.1.3 Influencer dalam Politik Hungaria

Adapun hal penting lainnya menurut William D. Coplin dalam teori pengaruh kebijakan hubungan antar aktor-aktor politik disebut dengan *policy influencer*. *Policy influencer* adalah sebagai aktor politik domestik dalam pengambilan keputusan (W. D. Coplin 2003, 74). Konteks ini bekerja secara timbal balik antara pengambil keputusan dan *policy influencer* sebagai *bargaining position* dalam sumber dukungannya untuk dapat mengambil keputusan. Jika ini tidak terpenuhi, maka dukungan dari *policy influencer* kepada pengambil keputusan akan hilang. Kendati pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan ini secara positif, akan tetapi mengakomodasikan sampai batas tertentu untuk dapat mengabaikan tuntutan ini (W. D. Coplin 2003, 76). Coplin menjabarkan menjadi empat macam tipologi perbedaan *policy influencer* dalam teorinya tersebut.

- *Bureaucratic Influencer*

Bureaucratic influencer disebut juga pemerintah yang ada dalam sistem atau pengaruh dari birokrat dalam pengambilan keputusan. Birokrat ini mengacu kepada individu maupun organisasi dalam eksekutif pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun, serta melaksanakan kebijakan. Kelompok-kelompok birokrat ini sering memberikan informasi untuk pengambilan keputusan serta digunakan sebagai instrumen bagi pelaksana keputusan tersebut (W. D. Coplin 2003, 82).

Partai Jobbik sebagai yang partai yang sangat anti terhadap kebijakan UE, dan naik untuk pertama kalinya ke parlemen dengan meraih hampir 15% suara dengan mendapatkan 26 kursi (Arungbudoyo 2018). Walaupun anggota partai ini menolak RUU Anti-pengungsi yang dirumuskan oleh Partai Fidesz, mereka beranggapan bahwa anti-imigrasi harus dipandang atas dasar yang kuat. Dengan memberlakukan anti-imigrasi terhadap semua orang asing di luar Hungaria (Marton 2016).

Justru Partai Fidesz yang jauh lebih tegas di bawah asuhan Presiden Victor Orban yang secara serius mengadakan pemungutan suara dalam pengesahan RUU anti-imigran, dari mereka yang memilih, 98% atau 3,3 juta pemilih, 40,4% pemilih memberikan suara sah. Akan tetapi, suara di bawa ambang batas 50% yang disyaratkan. Namun demikian, Victor Orban tetap menyatakan kemenangan dan segera menyerukan pemungutan suara secara konstitusional (Marton 2016). Victor Orban dengan tegas menyatakan,

“Hungaria tidak membutuhkan seorang pengungsi untuk bekerja demi ekonomi, atau untuk menopang populasi itu sendiri, atau demi sebuah negara agar memiliki sebuah masa depan” (Hanggoro 2016).

Pemimpin Partai Jobbik yakni Gabor Vona juga memberikan ketegasan yang kuat atas imigran, dia menyatakan baik migran miskin maupun kaya tidak boleh dizinkan untuk menetap di Hungaria (AFP 2016). Dari segi birokrasi hal ini tentunya seruan anti-imigran dan menolak masuknya imigran ke Eropa tegas keluar dari keputusan yang bulat oleh Perdana Menteri Hungari yaitu Victor Orban. Dia selaku Perdana Menteri yang besar atas pengaruh dengan kebijakan-kebijakan yang menolak imigran.

- *Partisan Influencer*

Partisan influencer disebut juga dinamika antar partai politik. Partai politik bertujuan menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politik yang dapat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Partai politik dalam negara demokrasi dianggap penting demi keberlangsungan rezim yang ada, sehingga suaranya sering didengar (W. D. Coplin 2003, 84).

Partai politik di Hungaria yang dianggap sangat penting adalah partai besuan Viktor Orban yakni Fidesz. Viktor Orban merupakan mantan Perdana Menteri Hungaria empat periode dari 2010-sekarang. Partai Fidez memegang kebijakan yang tidak bertentangan dengan integrasi Eropa, namun cenderung berfokus bagaimana kepentingan nasional harus dilindungi (Molnar,2014). Selanjutnya, partai Jobbik yang diketuai oleh Peter Jakab, merupakan partai nasionalis yang sangat konservatif. Partai ini cenderung sepenuhnya menentang integrasi Eropa di tingkat mana pun. Artinya, kedua partai dengan pandangan yang berbeda, memiliki gabungan ideologi yang sangat menghasilkan bentuk retorika Xenophobia.

- *Interest influencer,*

Interest influencer disebut juga kelompok kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Kelompok kepentingan tidak sebesar partai politik, namun sangat dibutuhkan untuk menyerahkan sumber-sumber untuk mendapatkan dokumen dari pengambil keputusan. Kelompok kepentingan ini biasanya memiliki sumber finansial yang besar sebagai nilai tawar dalam mempengaruhi pengambil keputusan (W. D. Coplin 2003, 87).

Dalam konteks *interest influencer*, solidaritas kelompok yang memiliki dana besar mendukung kebijakan anti-imigrasi cenderung tidak tersentralisasi. Justru

hal-hal yang terintegrasi, kelompok yang kontra terhadap kebijakan Victor Orban yang mengajukan RUU anti imigran. Seperti, Hergo Kovacs, mantan seniman yang mendirikan grup Spoof Two-Tailed Dog Party, dia memulai penggalangan dana dalam karya seninya bertajuk pada poster raksasa. Dengan tema menyindir ketidakmampuan pemerintah dalam menghentikan para pencari kerja Hungari yang bermigrasi di saat pemerintah ingin menghentikan imigrasi (M. Dunai 2015).

- *Mass Influencer*

Mass influencer disebut juga opini public yang mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Opini publik ini muncul dikarenakan mudahnya akses masyarakat terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan kebijakan, berita-berita yang muncul setiap hari, hingga upaya-upaya pers dalam menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat luas yang berimbas dapat mempengaruhi pemerintah sebagai pengambil kebijakan (W. D. Coplin 2003, 87).

Pada pertengahan tahun 2010, aliansi partai Fidesz/Demokrat Kristen telah mengubah sebagian besar saluran menjadi alat propaganda pro-pemerintah, termasuk kampanye anti-imigrasi skala besar pada tahun 2016. Hegemoni ideologis telah didirikan, sementara suara-suara kritis dan oposisi telah sebagian besar telah terpinggirkan. Outlet yang terang-terangan pro-pemerintah saat ini meliputi: empat belas penyiar “layanan publik”, saluran televisi komersial nasional (*TV2*), saluran berita kabel (*Echo TV*) (Bajomi-Lazar 2019, 2).

Beberapa stasiun radio lokal dan jaringan yang Pro-pemerintah yakni (*Karc FM, Radio I*), Sebagian besar stasiun radio komersial lokal menyiarkan ulang berita dari Hungarian Wireless Agency. Selain itu, ada berapa media cetak harian

berkualitas, seperti (*Magyar Idők, Magyar Hírlap*), outlet tabloid (*Riposzt*), sebagian besar mereka mempublikasi harian regional. Sementara beberapa majalah mingguan adalah (*Demokrata, Figyelő, Lokál*) dan sejumlah situs berita online (*Origo.hu, 888.hu, Ripost.hu*) (Bajomi-Lazar 2019, 2).

Tabel 2.1 Daftar Framing Media Pro-Pemerintah di Hungaria

No	Nama Media	Judul berita
1.	Szabadpecs.hu	<p>“Az egyik szégyelli, a másik akasztana, de mind eltűri”.</p> <p>https://szabadpecs.hu/2022/05/az-egyik-szegyelli-a-masik-akasztana-de-mind-elturi/#</p>
2.	Magyaridok.hu	<p>“Üzennek a fekete hegyek”.</p> <p>https://www.magyaridok.hu/ahelyzet/uzennek-a-fekete-hegyek-3117709/</p>
3.	Ripost.hu	<p>“Salvini: a tűzszünet minden európai tagállamnak nemzeti érdeke”</p> <p>https://ripost.hu/politik/2022/06/salvini-a-tuzszunet-minden-europai-tagallamnak-nemzeti-erdeke</p>
4.	888.hu	<p>“Illegális bevándorló molesztált eszméletlen nőket”.</p> <p>https://888.hu/amerika-london-parizs/illegalis-bevadorlo-molesztalt-eszmeletlen-noket-4342465/</p>

No	Nama Media	Judul berita
5.	Origo.hu	<p>“Horogkeresztet vágott a saját húsába az iráni migráns Németországban, majd azt hazudta, hogy megtámadták”.</p> <p>https://www.origo.hu/nagyvilag/20201118-horogkeresztet-vagott-a-sajat-husaba-az-irani-migrans-majd-azt-hazudta-hogy-megtamadtak.html</p>
6.	Karcfm.hu	<p>“Félmillió illegális bevándorló telepedhet le Olaszországban”</p> <p>https://karcfm.hu/2020/08/felmillio-illegalis-bevadorlo-telepedhet-le-olaszorszagban-hangolo-2020-05-14/</p>
7.	Figyelo.hu	<p>“Rosszabbul teljesítenek a bevándorló diákok”.</p> <p>https://figyelo.hu/hirek/rosszabbul-teljesitenek-a-bevadorlo-diakok-17169/</p>
8.	Demokrata.hu	<p>“Hat-hétezer bevándorló várakozhat a fehérorosz határnál”.</p> <p>https://demokrata.hu/vilag/hat-hetezer-bevadorlo-varakozhat-a-feherorosz-hatarnal-440259/</p>

Dari beberapa daftar media yang pro-pemerintah tercatat dalam penelitiannya Péter Bajomi-Lázár, terdiri dari 1248 artikel pada September 2016 menemukan 544 artikel membahas mengenai migrasi yang berjumlah 51% total dari publikasi

tersebut. Sementara pemerintah juga melancarkan kampanye terhadap pembentukan retorika atas penolakannya kepada imigran (Bajomi-Lazar 2019).

Secara kronologis, tema kampanye pertama adalah migrasi dari Afrika Utara dan Timur Dekat, yang dibingkai sebagai ancaman bagi Hongaria dan Eropa. Bahkan, poster pertama tampaknya ditujukan kepada para migran, karena mereka membawa pesan 'Jika Anda datang ke Hongaria, Anda harus menghormati hukum kami!' tetapi pesan itu ditulis dalam bahasa Hongaria, bukan bahasa yang digunakan oleh para migran, dan karena itu hanya dapat menarik bagi penduduk asli Hongaria.

Gambar 2.1 Informasi Pemerintah Hungaria



Sumber: vakkomondor/tumblr-24.hu (Gábor 2015).

Tema kampanye kedua, diluncurkan pada Juli 2017, adalah dugaan konspirasi dengan *billionaire* Amerika kelahiran Hungaria yakni George Soros sebagai dalang di balik migrasi. Pemerintah Hungaria menggambarkan George Soros sebagai musuh rakyat Hungaria. Pemodal memiliki “rencana” rahasia atau disebut dengan “rencana soros” untuk membawa jutaan pengungsi ke UE, dengan membongkar pagar perbatasan, serta membantu migran dengan mengorbankan orang Eropa (Szigetti 2017).

Gambar 2.2 Konsultasi Nasional (Rencana Soros)



Sumber: (Szigetti 2017).

Tema kampanye ketiga dan terbaru, mulai Februari 2019, adalah rencana rahasia yang dikaitkan dengan Uni Eropa dan secara pribadi oleh Presiden Komisi Jean-Claude Juncker, yang didukung oleh Soros dengan tujuan untuk meningkatkan migrasi. Kampanye tersebut mengaburkan batas antara migran ekonomi, pengungsi perang, serta antara migran dan teroris. Kampanye pemerintah Hungaria ini menuduh Juncker dan Soros ini melemahkan hak negara-negara anggota untuk

melindungi perbatasan mereka sendiri, dan mengklaim mereka menginginkan visa migran (Rankin 2019).

Gambar 2.3 Kampanye Soros dan Juncker



Sumber: Magyarország Kormánya/Facebook-theguardian.com (Rankin 2019).

Kampanye media telah digabungkan dengan 'konsultasi nasional'. Perdana Menteri Orbán mengirim surat kepada setiap warga negara dengan usia pemilih, menanyakan pertanyaan tentang migrasi dan mendorong mereka untuk menjawab. Pilihan jawaban dibingkai sejalan dengan pesan kampanye pemerintah dan

kemudian digunakan dalam komunikasi pemerintah sebagai referensi kehendak rakyat (Bernáth Gábor 2015).

2.2 Kapasitas Ekonomi dan Militer Hungaria

Pertama, Coplin menjelaskan bahwa penafsiran kapasitas ekonomi suatu negara harus mencakup analisis tentang kemakmuran negara tersebut, sejauh mana kekayaan itu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan pola-pola pertumbuhan ekonominya. Di mana upaya pembangunan ekonomi yang menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan luar negeri dalam menjawab prospek negara untuk mengalami pertumbuhan (W. D. Coplin 2003, 115). Adapun aspek analisis dan topik pada penelitian ini tidak mengkaji mengenai potensi dari prospek ekonomi Hungaria untuk membangun pertumbuhan ekonominya.

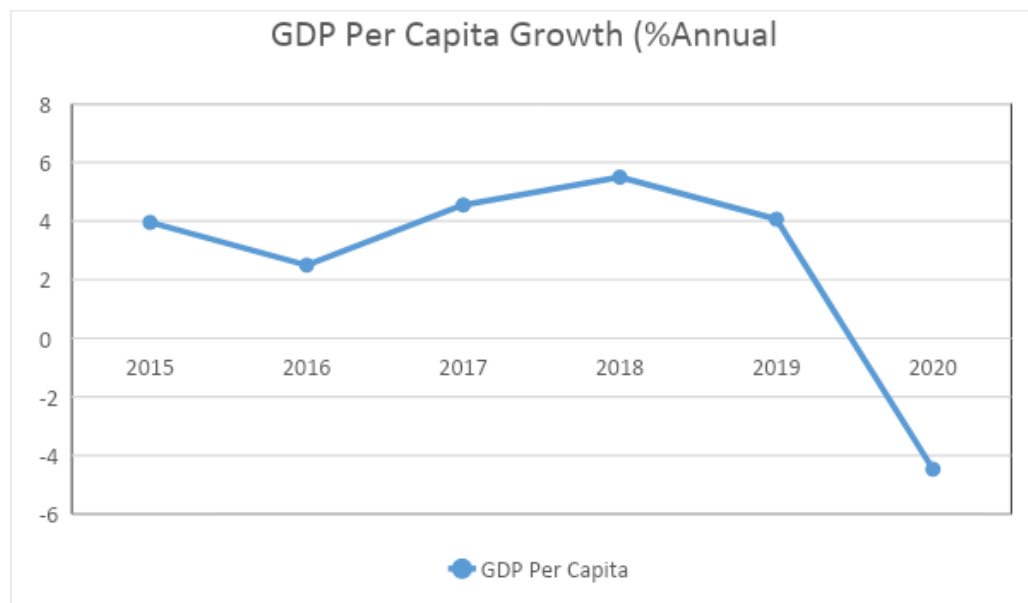
Kedua, Coplin menjelaskan bahwa kendati masalah keamanan menjadi tugas utama, namun pengambil keputusan politik luar negeri melihat ini sebagai bentuk peperangan yang terjadi di dalam negeri yang akan meruntuhkan rezim pemerintahan yang ada atau akan menimbulkan kehancuran (W. D. Coplin 2003, 129). Sementara kajian penelitian ini, berpotensi atau memiliki misi dan visi dalam melemahkan kedaulatan Hungaria dengan masuknya pengungsi tersebut.

2.2.1 Kapasitas Ekonomi

Dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, kemampuan ekonomi suatu negara memiliki peran yang penting. Dalam menganalisa perekonomian suatu negara aktor harus melihat kekayaan negara tersebut, pola pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Menurut data yang ada pada World Bank, GDP

Hungaria pada tahun 2015 mencapai pada angka 3.95% dan menurun sebesar 1.05% pada tahun 2016.

Table 2.3 GDP Per Capita Hungaria Per Tahun



Sumber: World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.

Penurunan ini disebabkan oleh besarnya arus migrasi ke Hungaria yang mau tidak mau mengharuskan pemerintah mengeluarkan anggaran besar terutama biaya yang dialokasikan bagi pencari suaka yang ditampung sementara di kamp perbatasan Roszke dan Tompa. Dimulai dari awal masuknya pengungsi ke Hungaria yang mengharuskan pemerintah untuk melakukan pengeluaran jangka pendek untuk membantu memberikan pengungsi yang datang bantuan kemanusiaan berupa makanan, tempat tinggal sementara, hingga pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada 2015, ketika arus kedatangan pengungsi memuncak, Hungaria sebagai salah satu negara utama yang terkena dampak dari kedatangan pengungsi harus

menerima dampaknya dengan menambah biaya belanja pemerintah. Hungaria yang berperan sebagai negara transit menuju Schengen mengumumkan bahwa adanya penambahan pengeluaran GDP sebesar 0.1%. Penambahan tersebut digunakan untuk mengganti biaya yang digunakan untuk mengurus kedatangan pengungsi.

Kedatangan migran secara masif di bagian selatan Hungaria menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah karena harus mengeluarkan biaya sejumlah 293 miliar Euro pada akhir tahun 2016, belum lagi kebijakan pembangunan pagar di kawasan perbatasan Hungaria-Kroasia yang telah menghabiskan anggaran hingga ratusan juta dolar yang ternyata hasilnya belum maksimal dalam mengurangi jumlah imigran ilegal (Progress Report from Hungary's Fenced Borderlands, n.d.).

Dengan adanya CEAS membuat Hungaria mau tidak mau menerima pencari suaka yang datang ke negaranya terlebih Hungaria merupakan negara aman pertama yang berdasarkan Regulasi Dublin No.604/2013, menetapkan bahwa negara Uni Eropa wajib mengizinkan akses untuk permohonan suaka di negaranya. CEAS sendiri bersifat conditional yang mengakibatkan kerangka sistem tersebut sering diperbarui (EUR-Lex - 52015DC0240 - EN - EUR-Lex, n.d.).

Untuk menangani lonjakan imigran dari laut Mediterania sejak akhir tahun 2014, Uni Eropa melalui European Commission mengajukan proposal berisi panduan yang perlu diterapkan ketika menghadapi kondisi darurat, pengajuan tersebut berdasarkan Traktat Lisbon Pasal 78 Ayat (3), yang berisi bahwa kondisi darurat terjadi ketika masuknya orang dari negara ketika secara tiba-tiba di beberapa titik dengan jumlah besar. Proposal itu sendiri berisikan skema perlindungan internasional di negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerima dan bertanggung jawab serta melakukan pemantauan aplikasi suaka untuk

menjamin kehidupan para pencari suaka.(HC 145 Foreign and Commonwealth Office Annual Report, 2010).

Pada akhir tahun 2019 munculnya Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian Hungaria menurun sebesar 4% karena Covid-19 serta masih adanya sisa – sisa imigran yang masih menetap di perbatasan Hungaria, sehingga pemerintah Hungaria harus mengeluarkan anggaran yang lebih untuk memenuhi kebutuhan para migran serta masyarakatnya yang terkena dampak virus tersebut.

2.2.2 Kapasitas Militer

Selain Kemampuan Ekonomi, Kemampuan militer merupakan salah satu peran penting yang mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara (Coplin 1971). Para aktor harus memikirkan kemampuan militer yang dimiliki negaranya untuk berjaga – jaga jika mengalami suatu konflik dari luar atau masyarakat asing yang datang ke negaranya. Coplin menjelaskan tiga aspek dalam kekuatan militer. Pertama, kapasitas negara dalam menggunakan kekuatan militer. Kedua, ketergantungan negara pada sumber – sumber asing untuk peralatan militer yang digunakan. Yang terakhir adalah kestabilan internal dalam kemampuan militer (Coplin 1971).

Coplin menjelaskan dalam bukunya bahwa kapasitas negara ketika menggunakan kekuatan militer tersebut bisa dilihat dari jumlah personel tentara dari negara tersebut, pelatihan personel dan perlengkapan militer yang dimiliki (Coplin 1971). Jika dilihat dari kapasitas pada anggaran militer dan jumlah personel militernya tidak sebesar dan sebanding pada Negara-negara yang tergabung dengan

NATO. Adapun data yang dimuat oleh World Bank Military Expenditure sebagai berikut.

Tabel 2.4 Anggaran Hungaria Untuk Bidang Pertahanan

Tahun	Jumlah dalam \$	% dari PDB
2015	\$1.13B	0.92%
2016	\$2.29B	1.02%
2017	\$1.46B	1.05%
2018	\$1.79B	1.15%
2019	\$1.09B	1.22%
2020	\$2.54B	1.64%

Sumber: World Bank Military Expenditure (% of GDP) – Hungary

Tabel 2.5 Jumlah Personel Tentara Hungaria

Tahun	Jumlah Personel
2015	38.500
2016	39.800
2017	40.000
2018	39.800
2019	40.000
2020	22.000

Sumber: World Bank Armed Forces Data - Hungary (Bank, Armed Forces Data 2020)

Dari table 2.5 di atas menjelaskan jumlah personel militer Hungaria dari tahun 2015 hingga 2020, meskipun jumlahnya tidak sebanyak negara – negara di Eropa namun Hungaria tergabung dalam NATO bahkan Hungaria memasuki 60 besar kekuatan militer terkuat di dunia. Selain itu militer Hungaria sering melakukan operasi Multinasional untuk membantu aliansinya saat berperang (Tibor Farkas 2014).

Jumlah militer yang tidak begitu banyak untuk melindungi Hungaria akan menyulitkan pertahanan Hungaria itu sendiri karena pengungsi yang telah datang ke Hungaria mencapai ratusan ribu pengungsi, sehingga Hungaria membuat pagar kawat berduri sepanjang perbatasan untuk membantu personel militer yang berjaga. Tak hanya untuk melindungi negaranya, para personel militer ditugaskan untuk mengawasi para pengungsi yang masuk diam-diam secara tidak resmi seperti melewati perbatasan menggunakan truk muatan atau ikut dengan orang yang mungkin dikenalnya, bahkan militer Hungaria diizinkan oleh pemerintah untuk memeriksa rumah-rumah pribadi untuk mencari migran ilegal. Militer Hungaria juga diizinkan untuk menggunakan senjata yang tidak mematikan seperti senjata berpeluru karet, gas air mata, kembang api dan senjata berjaring untuk berjaga-jaga jika terjadi kerusuhan di perbatasan Hungaria (DW.com 2015).

Nasionalisme adalah motivator utama di balik skeptisisme Eropa. Terlepas dari tujuan integrasinya, banyak tindakan yang diambil oleh UE telah menyebabkan pertumbuhan nasionalisme di seluruh Eropa. Banyak orang Euroskeptis mengeluh bahwa UE tidak memenuhi harapan, bahwa Uni Eropa terlalu fokus pada perluasan

sehingga menerima negara-negara dengan ekonomi lemah, menghambat kemajuan UE. UE telah menjanjikan penciptaan lapangan kerja bagi Negara-negara anggota yang potensial dan pembentukan lembaga-lembaga demokrasi yang cepat dan efisien. Karena janji belum terwujud, orang Eropa mulai tidak mempercayai UE, dan sebaliknya mengandalkan pemerintah nasional mereka (Joseph bebel 2015).

Kegagalan UE untuk menumbuhkan asimilasi yang meluas terhadap para imigran juga telah meningkatkan perasaan nasionalisme, yang mengarah pada kekerasan yang dipicu oleh xenofobia. Negara-negara dengan sejarah penindasan mulai melihat UE sebagai kekuatan lain yang mencoba menghancurkan budaya mereka dan mengambil kedaulatan nasional mereka. Kebangkitan nasionalisme di Eropa dapat merusak Proyek Eropa, sehingga UE harus mencapai keseimbangan antara menghormati banyak budaya negara anggota, sambil pada saat yang sama mempromosikan identitas Eropa yang kohesif (Joseph bebel 2015).

Bagi sebagian orang Hongaria, UE tampaknya mengingatkan pada kekuatan penindas sebelumnya dalam sejarahnya seperti Uni Soviet. Sebagai salah satu negara Euroskeptik paling kuat di Eropa Tengah dan Timur, kasus Hongaria menunjukkan kebutuhan untuk menangani setiap gerakan nasional secara individual. Di Hongaria, bagaimanapun, skeptis ini paling kuat berakar pada ketakutan akan budaya dan otonomi Hongaria yang dimasukkan oleh badan pemerintahan yang lebih besar. Tidak hanya orang-orang skeptis di Hungaria yang berpikir bahwa Brussel menjadi terlalu kuat, mereka juga percaya bahwa UE sedang melancarkan perang pribadi melawan Hungaria. Istilah "*Hungaricum*" diciptakan sebagai tanggapan atas konflik yang dirasakan ini, memberikan cara untuk melawan Brussel (Noval 2014).

Hungaricum meminta lebih banyak kekuatan untuk diberikan kepada pemerintah nasional dalam mewakili dan melindungi kepentingan dan kebutuhan rakyat Hongaria, yang mengarah pada nasionalisme militan yang menyebabkan Hongaria menjadi semakin Euroskeptik. Hal ini yang menjadi ancaman potensi dari masuknya pengungsi ke wilayah Eropa maupun Hungaria. Sehingga, pengungsi dijadikan ancaman utama dari mempengaruhi kedaulatan negara tersebut.



BAB III

SEBAB PENOLAKAN HUNGARIA TERHADAP CEAS

Pada bab sebelumnya penulis menjelaskan awal mula pembentukan *CEAS*, kondisi para pengungsi yang menuju ke Hungaria serta politik domestik yang dilakukan oleh pemerintah Hungaria dalam menangani krisis pengungsi yang terjadi di tahun 2015.

Penulis ingin membahas sebab Hungaria menolak kebijakan yang telah dibuat oleh *CEAS* dengan menggunakan teori *Decision Making* pada bab ini. Yang mana teori *Decision Making* ini sangat relevan dengan keadaan Hungaria karena pemerintah Hungaria membuat kebijakan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dan negaranya.

3.1 Faktor Geografis

Hungaria merupakan negara *landlocked* yang dikelilingi oleh tujuh negara, yaitu Slovakia, Ukraina, Rumania, Serbia, Slovenia, dan Austria. Hungaria merupakan negara topografi yang cenderung landai. Hanya terdapat 14% dari keseluruhan teritorial Hungaria dengan ketinggian 200 sampai 400 meter di atas permukaan laut. Wilayah landai terluas di Hungaria adalah The Great Plain yang mencakup 50% dari keseluruhan teritorial Hungaria (Samuel Mechiho 2019).

Gambar 3.1 Peta geografis Hungaria



Sumber: (BBC 2022)

Kondisi geografis dan topografis Hungaria yang landau mempermudah arus masuk imigran ke dalam negara. Imigran biasanya memasuki Hungaria melalui negara yang berbatasan langsung seperti Kroasia dan Serbia. Posisi Hungaria yang berada di wilayah perbatasan Uni Eropa juga membuat negara tersebut menjadi negara transit bagi para imigran yang berusaha untuk memasuki negara anggota Uni Eropa lainnya.

Hungaria telah membangun pagar di perbatasan Serbia dan mengerahkan patroli reguler, yang menyebabkan penurunan drastis migran yang melintasi perbatasan. Sebaliknya, ribuan migran telah memasuki Kroasia dan Zagreb dan memasuki wilayah Hungaria kembali. Kondisi Hungaria saat ini menolak aturan UE, sementara Kroasia tidak membatasi secara ketat wilayah perbatasan dengan Hungaria. Sehingga pemerintahan Hungaria mengancam akan memveto akses *Schengen* Kroasia dan mulai mengerjakan pagar pembatas di wilayah perbatasan Hungaria-Kroasia (Marton 2016). Adapun wilayah perbatasan Hungaria secara geografis sebagai berikut.

Selain itu, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto telah menyarankan negaranya berencana untuk membangun pagar untuk menjaga migran keluar

sepanjang bagian dari perbatasannya dengan Rumania, sesama anggota Uni Eropa untuk mencegah melewati perbatasan saat ini. Kerjasama pembangunan pagar ini jika dilakukan dengan Polandia dengan membangun 140 km panjang pagar tersebut (Erina 2022). Pembangunan tersebut juga dilakukan dengan Serbia yang membangun pagar 175 km. Serbia termasuk beberapa negara yang anti terhadap imigran tersebut, hal ini sangat sejalan dengan semangat ideologis dari kebijakan ini (Göbl 2015).

Polandia juga bentrok dengan Uni Eropa karena menolak kuota nasional bagi pencari suaka. Austria menerima pencari suaka sekitar satu persen dari populasinya pada tahun 2015 ketika berlangsung krisis migrasi di mana lebih dari satu juta orang melakukan perjalanan ke Eropa, banyak di antara mereka melarikan diri dari perang dan kemiskinan di Timur Tengah, Afrika dan tempat-tempat lain. Namun, dengan kemenangan kelompok konservatif garis keras dari Partai Kebebasan yang berhaluan sayap kanan, menentang secara keras pengaturan UE dan menolak imigran.

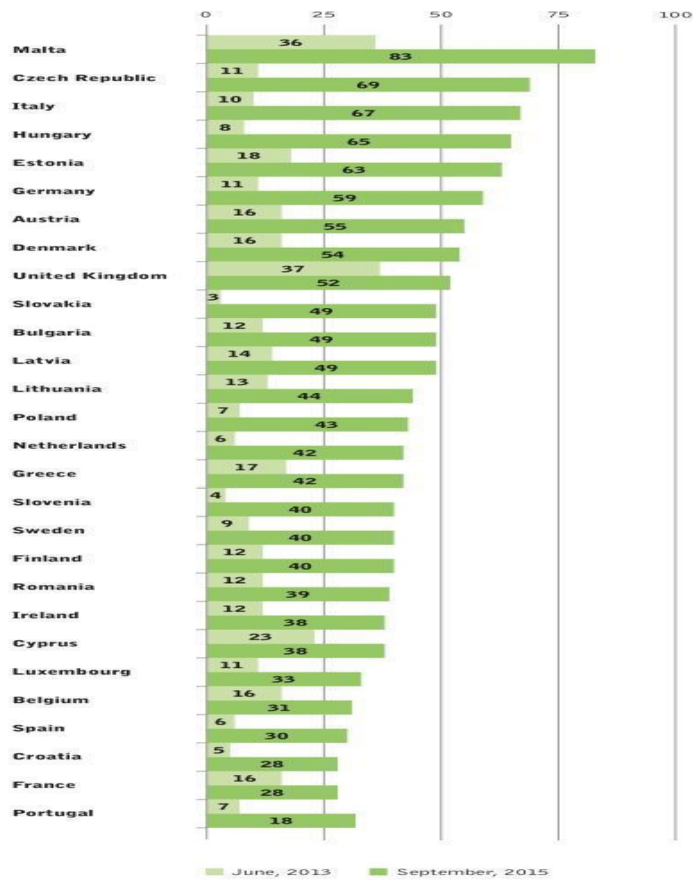
3.2 Faktor Ekonomi Internasional

Dalam bukunya, Coplin menjelaskan bahwa sifat dan hubungan antar negara dapat menentukan bagaimana negara tersebut berperilaku kepada dunia internasional (W. D. Coplin 1971). Dalam konteks internasional yang dijelaskan oleh Coplin, Hungaria bekerjasama dengan Uni Eropa dan *Visegrad*, dimana Hungaria mengambil peran di Uni Eropa dan *Visegrad*. Tak hanya negara *Visegrad* namun negara-negara di Eropa Tengah dan Timur serta negara-negara Baltik juga menolak keputusan EU dimana adanya pembagian kuota yang dilakukan oleh EU.

Hungaria merupakan anggota Uni Eropa yang mana seluruh negara di Eropa bergabung dalam organisasi regional tersebut. Hungaria menentang kedatangan pengungsi yang telah diterima oleh Uni Eropa karena Hungaria merupakan salah satu dari negara yang menerima pengungsi terbanyak di Eropa sehingga Hungaria tidak sanggup menerima lagi pengungsi. Uni Eropa menghukum Hungaria untuk membayar denda di muka dan membayar denda harian karena tidak mematuhi aturan yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk menerima para pengungsi. Menurut Mahkamah Konstitusi Uni Eropa aturan yang dibuat oleh Uni Eropa wajib diutamakan dari pada aturan hukum nasional yang mana itu sangat merugikan negara anggotanya seperti pemerintah Hungaria yang masih mementingkan warga negaranya (Aldabert Jahnz 2021). Sedangkan berbeda dengan para anggota *Visegrad* yang berisi 4 negara yang menolak aturan Uni Eropa yang mengakibatkan para negaranya mendapatkan kerugian dalam segi apapun. Para anggota *Visegrad* tidak setuju bila harus menerima para pengungsi karena persamaan latar belakang budaya, agama, geografis dan solidaritas sehingga keempat negara belum siap menerima dan mengaplikasikan masyarakat homogen dan menghilangkan segala perbedaan yang ada dalam suatu wilayah (Bauerov 2018).

Migrasi semakin dilihat sebagai tantangan utama di seluruh Eropa. Dalam survei Eurobarometer Mei 2015 itu sudah dianggap sebagai topik paling penting di Eropa dan rata-rata di seluruh anggota UE. Sementara Hungaria berada menempati peringkat keempat atas persepsi publik terhadap tantangan UE. Tantangan utama itu, meliputi imigrasi, terorisme, pengangguran, ketimpangan sosial, utang publik negara-negara anggota, dan akses pekerjaan bagi kalangan muda.

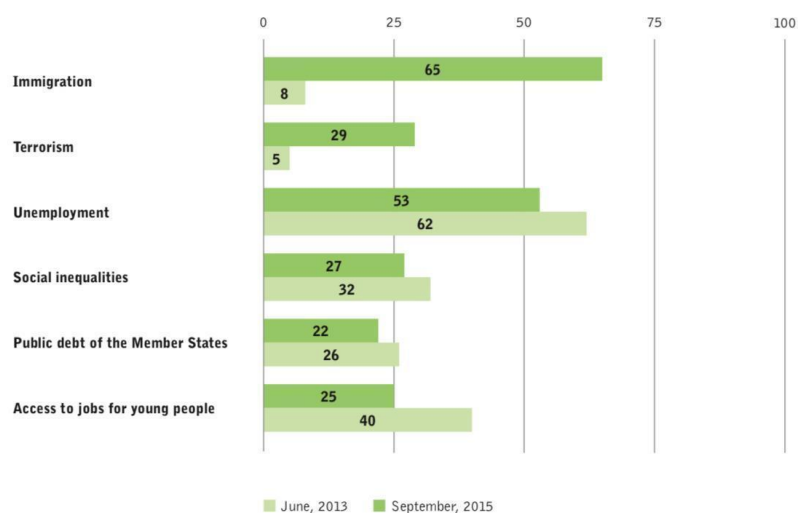
Gambar 3.2 Persepsi Publik atas Tantangan UE



Sumber: (B. H. Attila Juhász 2015).

Dari data yang dimuat di atas melampirkan bahwa di Hungaria terjadi perubahan besar berkenaan dengan sikap publik terhadap imigrasi terjadi pada tingkat persepsi. Warga Hungaria menganggap imigrasi sebagai salah satu masalah terpenting yang dihadapi negara itu pada tahun 2017 juga. Di antara masalah yang dihadapi Uni Eropa. Responden Hungaria percaya imigrasi dan terorisme adalah yang paling mendesak sejauh ini. Begitu halnya dengan Malta, Republik Ceko, dan Italia yang berada di atas Hungaria. Di antara dua masalah terpenting yakni imigrasi dan terorisme, berikutnya adalah situasi ekonomi. Berikut laporan dari parlemen eropa mengenai masalah yang dihadapi oleh EU.

Gambar 3.3 Tantangan utama yang dihadapi UE



Sumber: (B. H. Attila Juhász 2015).

Pada 2018 Pemerintah Italia telah mengambil sikap keras terhadap migrasi ini dengan Menteri Dalam Negeri Matteo Salvini untuk memperkuat perbatasan mereka. Dalam praktiknya, pihak berwenang Italia telah mencegah kapal-kapal kemanusiaan yang tengah membantu imigran ilegal yang berlabuh di perairan Mediterania, tepatnya di pelabuhan-pelabuhan Italia (Baczynska 2020). Polandia juga menolak untuk menerima imigran gelap, terutama di bawah skema kuota. Warsawa telah memperkuat keamanan nasional karena membatasi migrasi ke kawasan Eropa Tengah. Pemerintah Polandia telah menyerukan peningkatan dukungan untuk Frontex dan memperluas kekuatan agensinya agar lebih baik dalam mengatasi migrasi yang tidak teratur di perbatasan eksternal (Baczynska 2020).

Pemerintah Prancis juga melakukan hal yang sama mendorong pendekatan terkoordinasi untuk migrasi yang tidak teratur ke Uni Eropa. Presiden Emmanuel Macron mengatakan harus ada “sistem yang efisien, solidaritas dan tanggung jawab. Sementara Austria, Bulgaria, Hongaria, Republik Ceko, Slovakia, dan

Romania menolak menerima pencari suaka datang ke Uni Eropa selama musim panas tahun 2015 (Ekblom 2019). Keenam negara di sayap timur Uni Eropa ini menolak menerima pengungsi dan migran manapun dengan mengutip masalah keamanan dan mempertanyakan alasan hukum bagi Uni Eropa yang menetapkan kuota orang untuk menerima kuota tetap pada setiap negara anggota. Keenam negara ini juga menolak menandatangani pakta migrasi PBB tentang *principle of separating legal and illegal migration* (Schaart 2018).

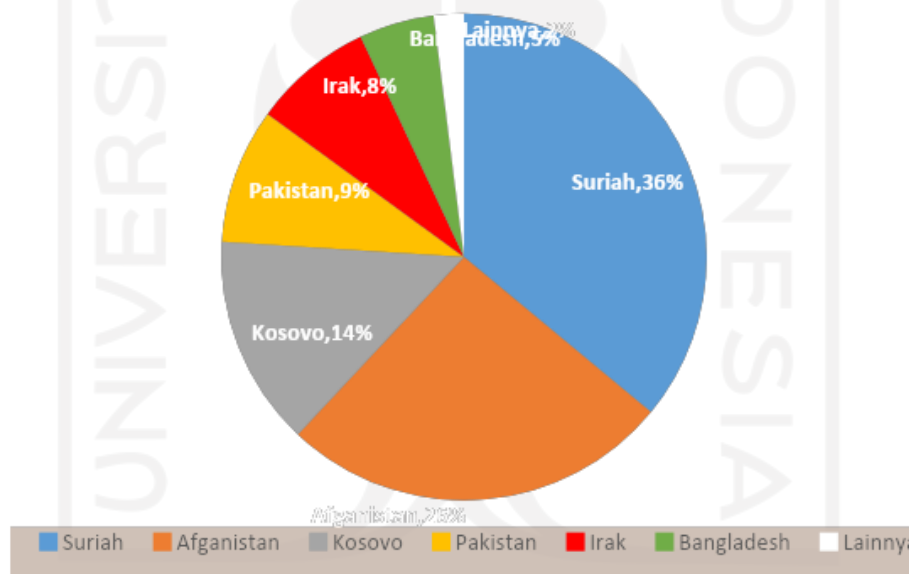
Salah satu negara yang menerima pengungsi akan tetapi secara ketimpangan kelahiran terjadi yakni Swedia. Negara ini mengikuti skema Jerman dengan menerima pengungsi untuk mengisi kekosongan usia produktif. Justru Pemikiran ekonomi seperti itu membuat Jerman berbeda dari Swedia, yang baru-baru ini menerima jumlah pengungsi tertinggi di Eropa per kapita, meskipun memiliki populasi yang tidak menurun. Pemerintahannya secara historis termasuk yang paling akomodatif di dunia dalam hal pengungsi, yang menjelaskan reaksi cepat Swedia adalah masalah krisis pengungsi (Noack 2015).

Meskipun pemerintah Swedia mengizinkan pencari suaka untuk segera bekerja, peluang untuk mendapatkan pekerjaan jangka Panjang rendah. Hampir setengah dari semua orang kelahiran asing berusia 25 hingga 64 tahun menganggur. Sebab, tidak banyak pekerjaan bagi imigran yang memiliki keterampilan cocok. Sementara Jerman sebagian besar pekerjaan yang tidak terisi dibuka secara umum program magang terhadap imigran-imigran ini. Hambatan yang terjadi di Swedia justru memberikan persyaratan yang tinggi membutuhkan gelar Pendidikan tinggi di Eropa (Noack 2015).

3.3.1 Kondisi Politik Negara Asal Pengungsi

Selama tahun 2015 terjadi pergeseran besar terkait negara asal pencari suaka. Dalam dua bulan pertama tahun ini, pencari suaka dari Kosovo menjadi mayoritas, tetapi mulai musim semi jumlah yang datang dari Suriah, Irak, Afghanistan, dan Pakistan meningkat secara dramatis. Karena pada paruh pertama tahun 2015 pejabat kabinet Orbán mengklaim bahwa sebagian besar pendatang ke Hongaria tidak melarikan diri dari perang dan dengan demikian memenuhi syarat sebagai “migran ekonomi” (B. H. Attila Juhász 2015).

Diagram 3.1 Permohonan Suaka di Hungaria tahun 2015
Menurut kewarganegaraan (dalam persen)



Sumber: Eurostat, 2015.

Isu para migran ini memang menjadi sorotan dunia, di mana Timur Tengah migran menyerbu EU sebagai pelarian dari negaranya tersebut. EU menjadi wilayah favorit bagi para pendatang dari Timur Tengah, terutama ke negara Hungaria ini. Di antaranya, Suriah menempati 36%, Afghanistan 26%, Kosovo 14%, Pakistan 9%, Irak 8%, Bangladesh 5%, dan lainnya 2%. Di tengah gelombang imigran tersebut, dijustifikasi beberapa negara pengungsi mengalami kondisi

keputusasaan ekonomi. Di atas keputusasaan ekonomi tersebut diakibatkan oleh perang yang terus mendorong masalah. Di antara ketiga negara teratas dari jumlah asal pengungsi, di antara yang diakibatkan oleh konflik yakni Suriah dan Afganistan, sementara di Kosovo terjadi akibat faktor sosial dan politik. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi negara-negara pengungsi tersebut sebagai berikut.

- Suriah

Suriah menjadi salah satu penyebab dari gelombang imigran terbesar di EU. Masalah migran di EU akibat konflik Suriah antara pemerintah Bashar Al-Ashad dan berbagai tekanan lainnya yang dimulai pada musim semi tahun 2011. Konflik negara ini menyebabkan pergeseran di dalam negeri dan seluruh wilayah Timur Tengah atau biasa dikenal dengan *arab spring*. Diperkirakan dari total 7,6 juta migran yang masuk pada tahun 2014 ke EU, di antaranya 3,7 jutanya warga Suriah yang telah melarikan diri dari negara sejak konflik dimulai (Zairani 2016).

Menurut laporan UNHCR lebih dari 70% pengungsi Suriah hidup dalam kemiskinan. Jutaan masyarakat Suriah telah kehilangan mata pencaharian dan semakin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti mengakses air bersih, listrik, makanan, obat-obatan, dan membayar sewa untuk rumah. Kemerostan ekonomi Suriah telah mengekspos mereka pada berbagai risiko perlindungan, seperti mempekerjakan anak, kekerasan berbasis gender, pernikahan dini dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (UNHCR 2021).

- Afganistan

Situasi di Afganistan sama jauhnya dengan keadaan yang terjadi di Suriah. Dengan terjadinya penarikan pasukan Amerika dan sekutu, adegan krisis memuncak dengan beberapa warga Afganistan mencoba untuk berpegangan pada pesawat asing saat mereka lepas landas, dalam upaya putus asa untuk melarikan diri dari Taliban. Hal ini diakibatkan oleh perebutan kekuasaan dari kelompok Taliban terhadap pemerintahan Ashraf Ghani (Amaro 2021).

Konflik berkepanjangan selama 40 tahun di Afganistan ini membuat situasi yang mengakibatkan efek yang mengerikan, seperti meningkatnya bencana alam, kemiskinan kronis, dan kerawanan pangan. Dari aspek kesehatan, malnutrisi memburuk, sistem kesehatan runtuh, dan ekonomi runtuh. Menurut laporan UNHCR diperkirakan setengah juta warga Afganistan berusaha meninggalkan negara itu untuk bermigrasi mencari peluang ekonomi yang baik (Spinelli 2021).

- Kosovo

Konflik kekerasan yang terus berlanjut di Kosovo telah menyebabkan, sejak musim semi 1998, peningkatan sepuluh kali lipat jumlah pengungsi dan orang terlantar, sekarang diperkirakan 700-800 ribu pengungsi dari Kosovo sudah menetap di Eropa. Negara ini masih sangat muda dengan mendeklarasikan kemerdekaannya pada 200 dan diakui oleh 100 negara (Fatos Bytyci 2015).

Migrasi dari Kosovo antara 2015–2020 didorong oleh beberapa faktor, terutama tingkat pengangguran yang tinggi, kesempatan kerja yang rendah, tingkat korupsi dan nepotisme institusional yang tinggi, kondisi

kehidupan yang buruk, tingkat kemiskinan yang meningkat, dan standar pendapatan yang tidak memadai. kesehatan dan pendidikan, yang semuanya tetap tidak tertangani oleh negara. Kaum muda, kecewa dengan ketidakteraturan pasar tenaga kerja yang sedang berlangsung termasuk pelanggaran hak asasi manusia pekerja, melihat peluang hidup yang lebih baik di negara-negara Uni Eropa dan sekitarnya (Labinot Hajdari 2021).

Faktor sosial-politik seperti ketidakstabilan politik, keamanan, infrastruktur, dan layanan yang lebih rendah berkontribusi pada ketidakpuasan di antara penduduk Kosovo, khususnya kaum muda yang mendorong migrasi. Pendorong migrasi tambahan adalah keinginan yang meningkat di antara orang-orang Kosovo untuk meniru standar UE seputar hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Kosovo memiliki populasi termuda di Eropa, tetapi juga termiskin. Sementara 53 persen populasi berusia di bawah 25 tahun. pengangguran kaum muda di Kosovo tetap di 46,9% pada Q3 2020, yang 31,8% lebih tinggi daripada pengangguran kaum muda di UE (Labinot Hajdari 2021).

Antara tahun 1969 dan 2011, sekitar 703.978 orang Kosovo bermigrasi, sedangkan pada tahun 2017, migrasi bersih diperkirakan mencapai 833.739. Faktor-faktor di balik migrasi terus-menerus bergeser seiring dengan berkembangnya pembangunan global. Penelitian telah mengkonfirmasi bahwa bentuk emigrasi reguler dan tidak teratur dari Kosovo telah meningkat, terutama karena alasan pekerjaan, pendidikan, atau reuni keluarga (Labinot Hajdari 2021).

3.3.2 Konteks Politik Uni Eropa

A. CEAS

Ada banyak alasan mengapa orang memutuskan untuk meninggalkan negara asalnya seperti untuk melarikan diri dari kekerasan, perang, kelaparan, kemiskinan, ataupun bencana alam yang membuat mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Mereka memutuskan untuk pergi dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Seperti yang terjadi di *EU* pada tahun 2015, *EU* mengalami krisis pengungsi secara besar-besaran yang diakibatkan konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Krisis tersebut menyebabkan semakin meningkatnya pencari suaka yang mayoritas berasal dari kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Iraq dan Afghanistan yang datang ke negara-negara *EU*. Menurut data *UNHCR*, sekitar 18% yang tiba di Eropa pada tahun 2020 merupakan anak-anak dan sekitar sepertiga dari mereka tidak didampingi oleh orang dewasa, di mana hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena membuat mereka sangat rentan terhadap bahaya, eksploitasi dan pelecehan (*UNHCR - Europe*, n.d.).

Permasalahan pun bertambah karena tidak semua negara anggota *EU* menerima kedatangan atau menampung pengungsi tersebut. Hak atas suaka sebenarnya merupakan hak dasar dan pengakuan bagi pengungsi, di mana kedua hal tersebut harus dipenuhi dan menjadi kewajiban internasional. Untuk mengatasi krisis tersebut akhirnya *EU* membuat kebijakan yang bernama *Common European Asylum System (CEAS)* pada tahun 1999, dibentuknya kebijakan ini bertujuan untuk menyelaraskan standar minimum bersama negara anggota *EU* dalam mengurus pengungsi di negaranya masing-masing. Kebijakan ini dibentuk oleh badan eksekutif Eropa seperti

yang ada dalam *Justice and Home affair (JHA)*. CEAS dibentuk melalui beberapa fase, fase pertama berdiri berdasarkan *Treaty of Amsterdam 1999* yang kemudian diamandemen tahun 2009 berdasarkan berlakunya *Lisbon Treaty* yang memperkuat dasar hukum mengenai suaka dan dianggap sebagai kebijakan yang mengikat secara hukum yang berlaku di *EU*. Fase kedua di bawah *Stockholm Program* pada tahun 2013. Setelah melewati beberapa fase, kebijakan CEAS memiliki beberapa aspek yaitu *Asylum Procedure Directive*, *Reception Condition Directive*, *Qualification Directive*, *Dublin Regulation*, dan *Eurodac Regulation*. (European Commission. Directorate General for Home Affairs., 2014).

CEAS sendiri dibentuk dengan tujuan agar semua negara anggota ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi, di mana suaka merupakan hak dasar dan kewajiban internasional bagi negara-negara, sebagaimana diakui dan tertuang dalam Konvensi Jenewa 1951 tentang perlindungan pengungsi dan Protokol 31 Januari 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi yang sebelumnya diatur dalam beberapa kebijakan seperti *Schengen Agreement*, *Dublin Convention*, dan disempurnakan dengan hadirnya CEAS (Commission, Common European Asylum System 2020). Parlemen *EU* selalu menyuarakan CEAS untuk pengurangan migrasi ilegal serta perlindungan bagi kelompok rentan. (*Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs Author: Ina Sokolska Directorate-General for Internal Policies PE*, n.d.)

EU mengembangkan dan menyelaraskan konsep, kriteria, interpretasi dan hukum suaka di negara-negara anggotanya agar perbedaan hukum

terhadap suaka di negara anggotanya bisa disatukan guna keadilan dan keefektifan bagi para anggotanya. *EU* juga ingin anggotanya bertanggung jawab untuk melindungi para pengungsi dari penyiksaan dan penindasan. Alasan *CEAS* dibentuk juga karena setiap negara anggota *EU* dibebaskan untuk berpergian ke negara lain selama masih dalam *EU*, sehingga penguatan kontrol perbatasan antar negara di Eropa diperkuat agar tidak terdapat perdagangan manusia di perbatasan antar negara. Peningkatan permintaan suaka pada tahun 2015 membuat negara anggota *EU* kewalahan dalam menghadapi permintaan pengungsi yang berjumlah sekitar 1,3 juta permintaan di seluruh Eropa, sedangkan permintaan suaka terbanyak terjadi di negara Hungaria di mana terdapat 1700 permintaan suaka (Connor 2016).

CEAS memiliki instrumen legislatif utama yang berkonsentrasi mengenai suaka, yaitu:

1. *EU treaties*

EU treaties didasari beberapa pasal seperti Pasal 67(2) *Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU)* yang menyatakan bahwa *EU* akan membingkai kebijakan bersama tentang suaka,

imigrasi dan kontrol perbatasan eksternal berdasarkan solidaritas antar negara anggota yang adil terhadap warga negara ketiga.

Selanjutnya, Pasal 78(1) *TFEU* dan Pasal 18 dari *EU Charter of Fundamental Rights* yang menetapkan bahwa negara anggota harus mengembangkan kebijakan umum tentang suaka yang bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan dan perlindungan sementara dengan maksud untuk menawarkan status yang sesuai

kepada para pencari suaka dari negara manapun yang membutuhkan perlindungan internasional dan memastikan kepatuhan dengan prinsip *non-refoulement*. Lalu Pasal 78(2) *TFEU* menetapkan bahwa parlemen *EU* harus bertindak sesuai dengan prosedur dan harus mengadopsi langkah-langkah sesuai *CEAS*. Yang terakhir, Pasal 80 *TFEU* yang secara eksplisit mengatur prinsip solidaritas dan pembagian secara adil serta bertanggung jawab termasuk implikasi keuangannya antara negara anggota.

2. *International Conventions*

Konvensi Jenewa 28 Juli 1951 yang dimodifikasi oleh Protokol 31 Januari 1967 yang berkaitan dengan status pengungsi memberikan kerangka hukum internasional yang saat ini berlaku untuk 148 negara yang terikat untuk bekerja sama dengan Badan Pengungsi *PBB (UNHCR)*. Pasal 1 Konvensi Jenewa mendefinisikan pengungsi sebagai “seseorang yang ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau opini tertentu”. Pengungsi yang mengalami keadaan tersebut tidak boleh dikembalikan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. (*Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Author: Ina Sokolska Directorate-General for Internal Policies PE, n.d.*)

b. Pro Kontra negara-negara Anggota Uni Eropa terhadap *CEAS*

Hingga saat ini, pembicaraan-pembicaraan dan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggota belum dapat menyelesaikan secara tuntas berbagai dilemma yang dihadapi dalam krisis pengungsi. Permasalahan utama adalah pada aksi efektif dalam melakukan remodeling dari pembagian tanggung jawab perlindungan dan hak asasi manusia di antara pemerintah negara-negara anggota UE ketika mekanisme Dublin tidak lagi bisa berjalan dalam masa krisis. Beberapa negara seperti Jerman, Perancis, Luxemburg, Belgia begitu antusias mengikuti kebijakan UE, namun demikian negara-negara seperti Hungaria, Ceko, Slovakia, dan Polandia enggan untuk mengikuti langkah kebijakan UE (Sergio Carrera 2015).

Salah satu negara yang menerima masuknya arus pengungsi ialah Jerman. Jerman yang merupakan salah satu negara mayor Uni Eropa memandang bahwa krisis pengungsi harus segera diatasi. Jumlah terbesar pengungsi dari Suriah yang masuk ke negara Uni Eropa berada di Jerman. Menanggapi masalah tersebut kanselir Jerman, Angela Merkel pada Agustus 2015 membuat kebijakan *Open Door Policy* (ODP) bagi para pengungsi khususnya pengungsi korban konflik Suriah. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah krisis pengungsi di Uni Eropa karena banyak negara-negara Uni Eropa lain yang menutup perbatasannya. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Common European Asylum System (CEAS).

Masuknya arus pengungsi ialah Jerman. Jerman yang merupakan salah satu negara mayor Uni Eropa memandang bahwa krisis pengungsi harus segera diatasi. Jumlah terbesar pengungsi dari Suriah yang masuk ke negara Uni Eropa berada di Jerman. Menanggapi masalah tersebut kanselir Jerman, Angela Merkel

pada Agustus 2015 membuat kebijakan Open Door Policy (ODP) bagi para pengungsi khususnya pengungsi korban konflik Suriah. Kebijakan ini dibuat untuk mengatasi masalah krisis pengungsi di Uni Eropa karena banyak negara-negara Uni Eropa lain yang menutup perbatasannya. Kebijakan ini merupakan implementasi dari Common European Asylum System (CEAS).

Keuntungan kesejahteraan Jerman dengan adanya imigrasi dapat diketahui dari fakta bahwa imigrasi dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja, yang menaikkan tingkat employment, produksi, dan akhirnya PDB (Ortega 2009). Imigrasi meningkatkan produktivitas ekonomi Jerman melalui kontribusi imigran sebagai tenaga kerja dan aktif secara ekonomi, sedangkan peran mereka sebagai tax payer akhirnya menentukan kontribusi mereka terhadap sistem kesejahteraan negara ini (*welfare state system*). Proyeksi populasi Jerman dari tahun 2016 hingga 2035 menghasilkan proyek dampak dari perubahan demografis terhadap beberapa indikator ekonomi Jerman (Martin Beznoka 2017).

Salah satu poin penting yang dapat dilihat adalah pendapatan pajak mengalami penurunan sebesar 6,6%. Namun, masuknya pengungsi sebagai bagian dari imigrasi menjadi solusi yang membantu mengatasi dampak dari *grey population* terhadap ekonomi Jerman. Imigran yang menjadi tenaga kerja produktif, dan lebih lanjut sebagai *tax payer*, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jerman. Hal tersebut dapat dilihat pada proyeksi perubahan dalam PDB tahunan negeri ini yang menunjukkan tren mengalami peningkatan sebagai hasil dari adanya migrasi pengungsi Jerman. Proyeksi peningkatan PDB ini secara tidak langsung juga berdampak pada peningkatan

jumlah pembayaran pajak ke Jerman, misalnya didapatkan dari pajak penghasilan termasuk dari imigran, di masa mendatang dengan adanya migrasi pengungsi (Trines 2017).



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang masalah Hungaria menolak kebijakan Common European Asylum System (CEAS), ditemukan beberapa analisis mengenai alasan penolakan tersebut. Di antaranya, *pertama*, faktor identitas dan budaya yang begitu kuat, ditandai dengan anggapan jika EU semakin kuat mengatur negara anggotanya, maka hal ini bentuk perang dengan Hungaria. *Kedua*, *decision maker* dalam politik Hungaria yang ditengarai oleh Victor Orban sebagai sosok kristen konservatif dengan ideologi populisme sayap kanan.

Ketiga, *influencer* dalam politik Hungaria yang berpengaruh terhadap penolakan tersebut, salah satunya *bureaucratic* yakni beberapa pemimpin partai politik seperti Fidezs (Victor Orban) dan pemimpin partai Jobbik (Gabor Vona). *Partisan influencer* memegang kekuatan besar seperti partai Fidezs dan Partai Jobbik. *Interest influencer* dengan adanya Hergo Kovacs yang mempengaruhi pemerintah dalam sikap oposisi. *Mass influencer* dengan adanya opini publik mayoritas media membenarkan tindakan-tindakan pemerintah seperti pada tabel 2.1 daftar framing media pro-pemerintah.

Keempat, kapasitas ekonomi Hungaria yang menurun diasumsikan akibat adanya gelombang imigrasi, ditandai dengan angka yang menurun 1,05% GDP Hungaria, sehingga kedatangan migran secara massif menimbulkan tanggungan biaya yang besar yakni 239 miliar euro di tahun 2016. *Kelima*, kapasitas militer yang menjadi motivator utama di balik skeptisme Hungaria terhadap UE telah

menimbulkan nasionalisme yang tinggi. *Keenam*, Faktor geografis dan ekonomi internasional, secara geografis Hungaria negara landlocked dikelilingi oleh tujuh negara dengan mayoritas menolak adanya CEAS dan imigran. Selanjutnya, secara ekonomi internasional Austria, Bulgaria, Hongaria, Slovakia, dan Romania merupakan negara yang menolak menandatangani pakta PBB tentang *principle of separating legal and illegal migration*.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini menganalisis faktor penolakan atas kebijakan CEAS bagi Hungaria dalam menangani krisis pengungsi pada tahun 2015-2020. Rekomendasi atas kajian di atas adalah dengan melengkapi kekosongan dari pembahasan yang dapat ditelusuri lebih lanjut, terutama mengenai analisis *xenophobia* terhadap penolakan atas kebijakan CEAS dan imigran di Hungaria.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AIDA, Asylum Information Database. 2020. *Country Hungary*. The European Council on Refugees and Exiles.
- AIDA, Asylum Information Database. 2018. *Country Report: Hungary*. European Council on Refugees and Exiles.
- Connor, Phillip. 2016. *Number of Refugees to Europe Surges to Record 1.3 Million in 2015*. Pew Research Center.
- Coplin, Wiliam D. 2003. *Pengantar Politik Internasional: suatu Telaah Teoritis*. Bandung: CV. Sinar Baru Algensindo.
- Milgrom, Jonathan Levin and Paul. 2004. "Introduction to Choice Theory."
- Waltz, Kenneth. 1979. *A Theory of International Politics*. New york: McGraw Hill.

Jurnal

- Attila Juhász, Bulcsú Hunyadi, Edit Zgut. 2015. "Focus on Hungary: Refugees, Asylum and Migration." *Political Capital* 34.
- Attila Juhász, Csaba Molnár, Edit Zgut. 2017. "Refugees, Asylum and Migration Issues in Hungary." *Heinrich-Böll-Stiftung e.V* 12.
- Attila Juhász, Csaba Molnár, Edit Zgut. 2017. "Refugees, Asylum and Migration Issues in Hungary." *Political Capital* 12.
- Bajomi-Lazar, Peter. 2019. "An anti-migration campaign and its impact on public opinion: The Hungarian Case." *European Journal of Communication* 00 (0): 1-10. Accessed 06 01, 2022. doi:<https://doi.org/10.1177/0267323119886152>
- Bernáth Gábor, Messing Vera. 2015. "Bedarálva A menekültekkel kapcsolatos kormányzati kampány és a tőle független megszólalás terepei." *Médiakutató* 16 (04): 7-17.

Ivanova, Diana. 2017. "HUNGARIAN SECURITY POLICY AND THE MIGRANT CRISIS (2015-2017)." *International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION* 169.

Joseph Bebel, Jon Collier. 2015. "Euroskepticism's Many Faces: The Cases of Hungary and the UK." *Claremont-UC Undergraduate Research Conference on the European Union 2015* (1/4): 13-24. Accessed 06 01, 2022. doi:10.5642/urceu.201501.04.

Koalíció, Demokratikus. 2019. *Európai Életet Az Európai Magyaroknak!* European Parliamentary Election Program, Budapest: Foundation for the New Republic.

Vadhanavisala, Onvara. 2019. "Radical Right-Wing Politics and Migrants and Refugees in Hungary." *European Journal of Social Sciences* 107.

Zairani. 2016. "Motivasi Jerman menerima pengungsi asal Timur Tengah tahun 2015." *JOM FISP* 1-15.

Internet

AFP. 2016. *Hungary's Jobbik could thwart Orbán's anti-migrant vote.* 10 08. Accessed 06 01, 2022. <https://www.euractiv.com/section/elections/news/hungarys-jobbik-could-thwart-orbans-anti-migrant-vote/>.

Aldabert Jahnz, Laura Berard, Ciarra Bottomley. 2021. *Migration: Commission refers HUNGARY to the Court of Justice of the European Union over its failure to comply with Court judgment.* November 12. Accessed May 9, 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5801.

Amaro, Silvia. 2021. *Europe fears a repeat of 2015 refugee crisis as Afghanistan collapses.* 08 18. Accessed 06 01, 2022. <https://www.cnn.com/2021/08/18/europe-fears-a-repeat-of-2015-refugee-crisis-as-afghanistan-collapses.html>.

Arungbudoyo, Wikanto. 2018. *Partai Menang Pemilu, PM Hungaria Berkuasa untuk Periode Ketiga.* 04 09. Accessed 06 01, 2022. <https://news.okezone.com/read/2018/04/09/18/1883956/partai-menang-pemilu-pm-hungaria-berkuasa-untuk-periode-ketiga>.

- Baczynska, Gabriela. 2020. *Factbox: EU divisions over migration to resurface under new plan*. 08 22. Accessed 06 02, 2022. <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-eu-factbox-idUSKCN26D135>.
- Bank, World. 2020. *Armed Forces Data*. Accessed April 28, 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1?locations=HU>.
- . 2020. *Military expenditure (% of GDP) - Hungary*. Accessed April 20, 2022. https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?end=2020&locations=HU&name_desc=false&start=2015&view=chart.
- Bauerov, Helena. 2018. "Migration Policy of the V4 in the Context of Migration Crisis." *Politic in Central Europe* 113.
- BBC. 2022. *Hungary country profile*. 06 07. Accessed 06 10, 2022. <https://www.bbc.com/news/world-europe-17380792>.
- . 2016. *Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in Seven Charts*. March 4. <https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911>.
- Commission, European. 2020. *Common European Asylum System*. Accessed November 15, 2021. https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en.
- . 2019. *European Website on Integration*. July 08. Accessed April 06, 2022. https://ec.europa.eu/migrant-integration/news/european-parliament-elections-what-do-parties-hungary-say-about-integration_en.
- Council, European. 2021. *EU asylum reform*. June 23. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-migration-policy/eu-asylum-reform/>.
- Dunai, Marton. 2016. *Hungary's nationalist Jobbik party to resubmit measure to ban resettlement of refugees*. 10 14. Accessed 06 01, 2022. <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugees-migrants-ban-resettlement-hungary-far-right-nationalist-jobbik-party-a7417216.html>.
- Dunai, Marton. 2015. *'Hungarians come home!' Group mocks Hungary's anti-immigrant drive*. 06 12. Accessed 06 01, 2022.

<https://www.reuters.com/article/uk-hungary-immigration-idUKKBN0OR1ZD20150612>.

- DW.com. 2015. *Hungary empowers military to act against refugees*. September 21. Accessed April 28, 2022. <https://www.dw.com/en/hungary-empowers-military-to-act-against-refugees/a-18728488>.
- EASO, European Asylum Support Office. 2016. "An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals." *A Judicial Analysis* 7.
- Ekblom, Jonas. 2019. *Poland, Hungary broke EU laws by refusing to host migrants: court adviser*. 10 31. Accessed 06 02, 2020. Poland, Hungary broke EU laws by refusing to host migrants: court adviser.
- EMN, Hungaria National Contact Point &. 2016. "European Commission." *European Commission*. December 31. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/default/files/13a_hungary_apr_part2_en.pdf.
- Eropa, Uni. 2021. *European Union*. January 25. Accessed November 10, 2021. https://europa.eu/european-union/about-eu/easy-to-read_en.
- European Asylum Support Office, EASO. 2016. *Support is our mission*. December 06. Accessed November 12, 2021. https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-european-asylum-system_en.
- European, Commission. 2020. "The European Union." *Public office of the European Union*. 02 1. Accessed 10 17, 2021. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac0a88a6-4369-11ea-b81b-01aa75ed71a1/language-en>.
- Fatos Bytyci, Krisztina Than. 2015. *Dramatic surge in Kosovars crossing illegally into EU*. 04 02. Accessed 06 01, 2022. <https://www.reuters.com/article/us-kosovo-eu-migrants-idUSKBN0L811120150204>.
- Gábor, Medvegy. 2015. „*Ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a kultúrákat*”. 06 04. Accessed 06 02, 2022. <https://24.hu/belfold/2015/06/04/ha-magyarorszagra-jossz-tiszteletben-kell-tartanod-a-kulturankat/>.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. 2014. "Munculnya Kekuatan Politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya." *Agama dan Demokrasi* 87 -89.

- Gregori, Nina. 2020. *EASO Asylum Report 2020*. European Asylum Support Office.
- Hanggoro, Marcheilla Ariesta Putri. 2016. *PM Hungaria sebut imigrasi 'racun' bagi Eropa*. 08 27. Accessed 06 01, 2022. <https://www.merdeka.com/dunia/pm-hungaria-sebut-imigrasi-racun-bagi-eropa.html>.
- Labinot Hajdari, Judita Krasniqi. 2021. *The economic dimension of migration: Kosovo*. 11 17. Accessed 06 01, 2022. <https://www.nature.com/articles/s41599-021-00923-6>.
- Martin Beznoka, Tobias Hentze. 2017. "Demographic change and income tax revenue in Germany: a microsimulation approach." *Public sector Economics* 41 (01): 71-84.
- Matthew Goodwin, Thomas Raines, Professor David Cutts. 2017. *What Do Europeans Think About Muslim Immigration?* February 07. Accessed April 10, 2022. <https://www.chathamhouse.org/2017/02/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration>.
- Network, European Migration. 2021. "The impact of COVID-19 in the migration area in EU and OECD countries." *Europa*. January 29. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_232.
- Noack, Rick. 2015. *This map helps explain why some European countries reject refugees, and others love them*. 09 08. Accessed 06 01, 2022. <https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/09/08/this-map-helps-explain-why-some-european-countries-reject-refugees-and-others-love-them/>.
- Noval, Benjamin. 2014. *The many faces of euroscepticism in Hungary and Central Europe*. 05 2014. Accessed 06 01, 2022. <https://budapestbeacon.com/many-faces-euroscepticism-hungary-central-europe/>.
- Ortega, Francesc and Peri, Giovanni. 2009. "The Causes and Effects of International Labor Mobility: Evidence from OECD Countries 1980-2005." *mpra.ub.uno*. 03 01. Accessed 06 01, 2022. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/19183/>.
- Peter Kreko, Bulcsu Hunyadi dan Patrik Szicherle. 2019. *Anti-Muslim populism in Hungary: From the margins to the mainstream*. July 24. Accessed April 10,

2022. <https://www.brookings.edu/research/anti-muslim-populism-in-hungary-from-the-margins-to-the-mainstream/>.
- Pronczuk, Matina Stevis-Gridneff and Monika. 2020. *E.U. Court Rules 3 Countries Violated Deal on Refugee Quotas*. april 2. <https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/europe/european-court-refugees-hungary-poland-czech-republic.html>.
- Putri, Winda Destiana. 2017. *Cegah Migran Ilegal, Hungaria Bangun Pagar Canggih Beraliran Listrik*. 03 03. Accessed 06 02, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/om7xfs359/cegah-migran-ilegal-hungaria-bangun-pagar-canggih-beraliran-listrik>.
- Rankin, Jennifer. 2019. *Brussels accuses Orbán of peddling conspiracy theory with Juncker poster*. 02 19. Accessed 06 01, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2019/feb/19/brussels-orban-jean-claude-juncker-poster-george-soros-hungary>.
- Salsabila, Nadia Khansa. 2019. "Aspek Pragmatisme Dalam Kebijakan Pintu Terbuka Jerman terhadap Pengungsi Timur Tengah: Solusi Grey Population." *Jurnal Hubungan Internasional* (01): 1-16.
- Schaart, Eline. 2018. *Czech Republic latest EU country to reject UN migration treaty*. 11 14. Accessed 06 02, 2022. <https://www.politico.eu/article/czech-republic-migration-refugees-latest-eu-country-to-reject-united-nations-treaty/>.
- Sergio Carrera, Steven Blockmans, Daniel Gros and Elspeth Guild. 2015. *The EU's Response to the Refugee Crisis: Taking Stock and Setting Policy Priorities*. 12 16. Accessed 06 02, 2022. <https://www.ceps.eu/ceps-publications/eu-response-refugee-crisis-taking-stock-and-setting-policy-priorities/>.
- Spindler, William. 2015. *2015: The year of Europe's refugee crisis*. December 08. 2015: The year of Europe's refugee crisis.
- Spinelli, Francesca. 2021. *How the Legacy of the 2015-2016 "Refugee Crisis" is Affecting Afghans*. 10 21. Accessed 06 01, 2022. <https://www.greeneuropeanjournal.eu/the-legacy-of-the-2015-2016-refugee-crisis/>.

- Stickland, Patrick. 2016. *Hungary's Border War on Refugees*. April 1. Accessed April 28, 2022. <https://www.aljazeera.com/features/2016/4/1/hungarys-border-war-on-refugees>.
- Szigetti, Tom. 2017. *Hungarian Opposition Parties Accuse Gov't of Lying about Number of Responses to 'National Consultation' on the "Soros Plan"*. 11 28. Accessed 06 02, 2022. <https://hungarytoday.hu/hungarian-opposition-parties-accuse-government-lying-number-responses-controversial-national-consultation-soros-plan-59547/>.
- theguardian. 2018. *Hungary passes anti-immigrant 'Stop Soros' laws*. 06 20. Accessed 06 02, 2022. <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/20/hungary-passes-anti-immigrant-stop-soros-laws>.
- Trines, Stefan. 2017. *Lessons From Germany's Refugee Crisis: Integration, Costs, and Benefits*. 02 05. Accessed 06 01, 2022. <https://wenr.wes.org/2017/05/lessons-germanys-refugee-crisis-integration-costs-benefits>.
- UNHCR. 2021. *Syria Refugee Crisis – Globally, in Europe and in Cyprus*. 03 18. Accessed 06 01, 2022. <https://www.unhcr.org/cy/2021/03/18/syria-refugee-crisis-globally-in-europe-and-in-cyprus-meet-some-syrian-refugees-in-cyprus/>.
- UNICEF. 2021. "Humanitarian Action of Children." *UNICEF*. Accessed September 30, 2021. <https://www.unicef.org/media/87571/file/2021-HAC-Refugee-and-migrant-crisis-Europe.pdf>.
- Union, European. 2020. *European Union*. July 23. Accessed November 1, 2021. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en.
- . 2020. *Hungary*. July 02. Accessed November 21, 2021. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/hungary_en.
- Union, European. 2020. "The European in Brief." In *What it is and What it does*, by European Union Publication, 7-8. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

—. 2021. *The history of the European Union*. September 08. Accessed October 17, 2021. https://europa.eu/european-union/about-eu/history_en.

World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. 2022. *GDP per capita growth (annual %) - Hungary*. Accessed March 30, 2022. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD.ZG?end=2020&locations=HU&start=2015&view=chart>.

